

INDIKATOR EKONOMI

Provinsi Nusa Tenggara Timur

2019



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

INDIKATOR EKONOMI

Provinsi Nusa Tenggara Timur

2019



INDIKATOR EKONOMI

Provinsi Nusa Tenggara Timur 2019

ISSN	: 2460-6189
Nomor Publikasi	: 53550.2006
Katalog BPS	: 9201001.53
Ukuran Buku	: 17,6 x 25 cm
Jumlah Halaman	: x iv+ 90 halaman
Naskah	: Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur
Penyunting	: Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur
Gambar Kulit	: Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur
Diterbitkan Oleh	: © Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur
Dicetak Oleh	: Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggunakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

Tim Penyusun

**INDIKATOR EKONOMI
Provinsi Nusa Tenggara Timur 2019**

Pengarah :

Darwis Sitorus, S.Si, M.Si

Penanggung Jawab :

Matamira B. Kale, S.Si, M.Si

Editor :

Nurani Vita Christiani, SST.,M.M

Penulis:

Tristy Welas Ulas Jati, SST

Desain/Layout:

Tristy Welas Ulas Jati, SST

Indikator Ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur 2019 merupakan publikasi yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur. Publikasi ini pada dasarnya merupakan kelanjutan dari publikasi yang telah diterbitkan secara berkala setiap tahun.

Dalam publikasi ini dimuat berbagai data pokok yang berkaitan dengan kondisi perekonomian Nusa Tenggara Timur. Data yang disajikan antara lain mencakup keadaan penduduk dan tenaga kerja, pertumbuhan dan struktur ekonomi, pendapatan dan kemiskinan penduduk, tingkat konsumsi penduduk, keadaan harga dan inflasi, serta perkembangan sektor-sektor ekonomi.

Oleh karena berbagai keterbatasan yang ada maka disadari bahwa publikasi ini masih belum sepenuhnya mampu memenuhi semua kebutuhan data dan informasi dari berbagai pihak. Kami sangat mengharapkan dan menghargai kritik dan saran untuk memperbaiki publikasi ini di masa yang akan datang.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan publikasi ini diucapkan banyak terima kasih.

Kupang, Oktober 2020
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Nusa Tenggara Timur



Darwis Sitorus

Kata Pengantar

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xiii
Bab 1 Pendahuluan	3
1.1 Ruang Lingkup	3
1.2 Sumber Data	4
Bab 2 Kependudukan	7
2.1 Penduduk	7
2.2 Angkatan Kerja	13
Bab 3 Produk Domestik Regional Bruto	25
3.1 Pertumbuhan Ekonomi	26
3.2 Struktur Ekonomi Nusa Tenggara Timur	27
3.3 PDRB Per Kapita	29
Bab 4 Kemiskinan	33
4.1 Metode Penghitungan Kemiskinan	34
4.2 Sumber Data	35
4.3 Perhitungan Kemiskinan	35
4.4 Perubahan Garis Kemiskinan	37
Bab 5 Konsumsi dan Pengeluaran Penduduk	41
5.1 Pola Pengeluaran/Konsumsi Penduduk	42
5.2 Distribusi Penduduk Menurut Kelompok Pengeluaran	43
Bab 6 IHK, Inflasi dan NTP	47
6.1 Indeks Harga Sembilan Bahan Pokok	48
6.2 Laju Inflasi	48
6.3 Nilai Tukar Petani (NTP)	51

Bab 7 Perkembangan Sektor Produksi	55
7.1 Sektor Pertanian	56
7.2 Sektor Pertambangan dan Penggalian	65
7.3 Sektor Industri Pengolahan	56
7.4 Sektor Pengadaan Listrik dan Gas	67
7.5 Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	68
7.6 Sektor Konstruksi	68
Bab 8 Perkembangan Sektor Tersier	71
8.1 Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	71
8.2 Sektor Transportasi dan Pergudangan	72
8.3 Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	83
8.4 Sektor Informasi dan Komunikasi	84
8.5 Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi	85
8.6 Sektor Real Estat	88
8.7 Sektor Jasa Perusahaan	88
8.8 Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	88
8.9 Sektor Jasa Pendidikan	90
8.10 Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	90
8.11 Sektor Jasa Lainnya	90

Tabel 2.1	Laju Pertumbuhan Penduduk NTT Menurut Kabupaten/ Kota, 2010-2019	9
Tabel 2.2	Distribusi dan Kepadatan Penduduk Provinsi NTT Menurut Kabupaten/Kota, 2019	10
Tabel 2.3	Penduduk NTT Menurut Kelompok Umur, 2019	11
Tabel 2.4	Rasio Beban Tanggungan (<i>Dependency Ratio</i>) Penduduk NTT Menurut Jenis Kelamin, 2019	12
Tabel 2.5	Penduduk Usia Kerja Menurut Kegiatan dan Jenis Kelamin, 2019	13
Tabel 2.6	Angkatan Kerja (AK) Menurut Jenis Kelamin dan Daerah, 2016-2019	14
Tabel 2.7	Bukan Angkatan Kerja (BAK) Menurut Jenis Kelamin dan Daerah, 2016-2019	14
Tabel 2.8	Indikator TPAK, 2016-2019	15
Tabel 2.9	Penduduk Bekerja Menurut Jenis Kelamin dan Daerah, 2016-2019	16
Tabel 2.10	Indikator TPT, 2016-2019	16
Tabel 2.11	Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan dan Jenis Kelamin, 2019	18
Tabel 2.12	Status Pekerjaan Utama Penduduk Yang Bekerja Menurut Jenis Kelamin dan Daerah, 2019	19
Tabel 2.13	Tingkat Pendidikan Penduduk Yang Bekerja Menurut Jenis Kelamin dan Daerah, 2019	20
Tabel 2.14	Tingkat Pendidikan Penganggur Menurut Jenis Kelamin dan Daerah, 2019	21
Tabel 3.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi Per Tahun NTT dan Indonesia (persen), 2015-2019	26

Tabel 3.2	Peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen), 2015-2019	27
Tabel 3.3	PDRB Per Kapita Menurut Lapangan Usaha (Juta Rp), 2015-2019	29
Tabel 4.1	Garis Kemiskinan NTT, September 2018-September 2019	37
Tabel 5.1	Distribusi Pengeluaran Rata-Rata Per Kapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran di NTT, 2018-2019	43
Tabel 5.2	Persentase Rumah Tangga Menurut Golongan Pengeluaran Per Kapita Per Bulan, 2018-2019	44
Tabel 6.1	Indeks Harga Konsumen NTT Menurut Kelompok Komoditas, 2019	48
Tabel 6.2	Indeks Harga Konsumen Bulanan NTT dan Nasional, 2019	50
Tabel 6.3	Inflasi NTT dan Nasional, 2018-2019	50
Tabel 6.4	Nilai Tukar Petani di Provinsi NTT, 2016-2018	51
Tabel 7.1	Perkembangan Luas Panen, Rata-Rata Produksi dan Produksi Padi, 2017-2019	56
Tabel 7.2	Perkembangan Luas Panen, Rata-Rata Produksi dan Produksi Tanaman Palawija, 2018-2019	57
Tabel 7.3	Perkembangan Produksi Sayur-Sayuran (kuintal), 2017-2019	58
Tabel 7.4	Perkembangan Produksi Buah-Buahan (ton), 2017-2019	59
Tabel 7.5	Produksi Tanaman Obat-Obatan (kg), 2017-2019	60
Tabel 7.6	Populasi Ternak/Unggas dan Perubahannya, 2018-2019	63
Tabel 7.7	Jumlah Rumah Tangga Usaha Perikanan Laut Menurut Kategori Usaha, 2017-2018	63
Tabel 7.8	Produksi Perikanan Laut di NTT (ton), 2017-2018	64
Tabel 7.9	Peranan dan Pertumbuhan Sektor Pertambangan dan Penggalian di NTT, 2015-2019	66

Tabel 7.10 Peranan dan Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan di NTT, 2015-2019	66
Tabel 7.11 Peranan dan Pertumbuhan Sektor Listrik dan Gas di NTT, 2015-2019	67
Tabel 7.12 Peranan dan Pertumbuhan Sektor Konstruksi di NTT, 2015-2019	68
Tabel 8.1 Neraca Perdagangan NTT, 2015-2019	72
Tabel 8.2 Peranan Lapangan Usaha Terhadap PDRB Kategori Transportasi dan Pergudangan (persen), 2015-2019	73
Tabel 8.3 Panjang Jalan Provinsi di NTT Menurut Kabupaten/Kota (kilometer), 2019	74
Tabel 8.4 Panjang Jalan Provinsi Menurut Jenis Permukaan Jalan dan Kabupaten/Kota di NTT, 2018	75
Tabel 8.5 Arus Kunjungan Kapal Laut Pada Setiap Pelabuhan Laut, 2019	76
Tabel 8.6 Arus Penumpang Kapal Laut Pada Setiap Pelabuhan Laut, 2019	77
Tabel 8.7 Volume Bongkar Muat Barang dan Peti Kemas Pada Setiap Pelabuhan Laut, 2019	78
Tabel 8.8 Perkembangan Arus Pesawat dan Penumpang di NTT, 2015-2019	80
Tabel 8.9 Lalu Lintas Pesawat dan Penumpang Lewat Pelabuhan Udara di NTT, 2019	80
Tabel 8.10 Banyaknya Bongkar Muat Barang Angkutan Udara (ton), 2014-2018	81

Tabel 8.11	Volume Bongkar Muat Barang Menurut Pelabuhan Udara di NTT (ton), 2018	82
Tabel 8.12	Persentase Tingkat Penghunian Kamar Hotel Berbintang di NTT, 2019	83
Tabel 8.13	Jumlah Pelanggan Telepon Kelompok Perusahaan dan Perorangan di Setiap Kabupaten/Kota, 2019	85
Tabel 8.14	Jumlah Kantor Bank Umum di NTT Menurut Kabupaten/Kota, 2019	86
Tabel 8.15	Posisi Kredit Perbankan Menurut Jenis Penggunaan di NTT, 2014-2018	87
Tabel 8.16	Posisi Kredit Perbankan Menurut Kelompok Kabupaten/Kota di NTT, 2014-2018	87
Tabel 8.17	Realisasi Pendapatan Daerah Otonom Tingkat I NTT Menurut Jenis Pendapatan, Tahun Anggaran 2018	89

Daftar Gambar

Gambar 4.1	Persentase Penduduk Miskin (P0) Nasional dan Provinsi NTT, 2011-2019	36
Gambar 4.2	Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin NTT, 2011-2019	37

<https://ntt.bps.go.id>

BAB 1.

PENDAHULUAN

Kependudukan

Produk Domestik Regional Bruto

Kemiskinan

**Konsumsi Penduduk, Indeks
Harga Konsumen, dan Inflasi**

**Perkembangan Sektor
Produksi dan Tersier**

Bab 1. Pendahuluan



Sumber Gambar : liputan6.com

1.1 Ruang Lingkup

Indikator Ekonomi Nusa Tenggara Timur tahun 2019 merupakan publikasi yang menyajikan gambaran tentang kondisi perekonomian di Nusa Tenggara Timur secara umum. Mengingat perkembangan perekonomian di Nusa Tenggara Timur cukup dinamis, maka BPS berusaha menyajikan publikasi ini setiap tahun.

Cakupan masalah perekonomian suatu wilayah pada dasarnya sangat luas. Akan tetapi sesuai dengan kondisi dan kendala yang ada maka data dan informasi yang disajikan dalam publikasi ini masih terbatas pada hal-hal yang benar-benar dianggap penting. Penyajian berbagai indikator dalam publikasi ini dibagi ke dalam tujuh kelompok sebagai berikut:

- Kependudukan
- Produk Domestik Regional Bruto
- Kemiskinan Penduduk
- Konsumsi/Pengeluaran Penduduk
- Indeks Harga dan Inflasi
- Perkembangan Sektor Produksi
- Perkembangan Sektor Tertier (jasa)

Selain menyajikan data dasar dalam bentuk tabel-tabel indikator, dalam publikasi ini disajikan pula berbagai ukuran statistik seperti rasio, persentase, laju pertumbuhan, dan ukuran statistik lain. Sebagai pelengkap disertakan pula ulasan singkat tentang berbagai indikator terkait yang dimaksudkan untuk mempertajam penyajian berbagai data dasar.

1.2 Sumber Data

Data yang disajikan dalam publikasi ini pada dasarnya merupakan hasil pengumpulan data yang secara langsung dilakukan oleh BPS, dilengkapi dengan hasil pengumpulan data yang dilakukan oleh berbagai instansi lain. Berbagai kegiatan survei dan sensus BPS yang hasilnya disajikan dalam publikasi ini antara lain adalah Sensus Penduduk, Sensus Ekonomi, Sensus Pertanian, Survei Sosial Ekonomi Nasional, Survei Harga-Harga, Survei Hotel/Losmen, dan survei-survei lain.

Pembahasan dalam publikasi ini bersifat umum dan terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan perekonomian. Sedangkan pembahasan lebih mendalam secara parsial dapat dilihat pada berbagai publikasi khusus seperti Statistik Sosial dan Kependudukan, Indikator Kesejahteraan Rakyat, Statistik Pertanian, Statistik Harga Konsumen, Statistik Angkutan Udara, Pendapatan Regional, Produk Domestik Regional Bruto, Indeks Pembangunan Manusia dan sebagainya.

BAB 2. KEPENDUDUKAN



1,55 %

Laju
Pertumbuhan
Penduduk
NTT
2018-2019



Kabupaten Rote Ndao
Memiliki Laju
Pertumbuhan
Penduduk Tercepat di
Tahun 2019

3,65%

Bab 2. Kependudukan



Sumber Gambar : people.howstuff.works.com

2.1 Penduduk

Dalam perekonomian suatu wilayah, penduduk memiliki peran penting, yaitu sebagai pelaku ekonomi. Pengamatan potensi penduduk dalam konteks perekonomian wilayah antara lain dapat dilakukan dari sisi jumlah, komposisi menurut umur, keterserapan oleh dunia kerja, tingkat pengangguran, rasio beban ketergantungan, dan sebagainya.

Dalam kegiatan perekonomian, penduduk memiliki peran ganda, yaitu sebagai subyek sekaligus obyek dari kegiatan ekonomi. Oleh karena itu perkembangan jumlah penduduk hendaknya selalu dicermati dalam pelaksanaan pembangunan, khususnya di bidang ekonomi. Di satu sisi, peningkatan jumlah penduduk suatu wilayah berarti pula sebagai peningkatan jumlah tenaga kerja yang siap mengambil peran dalam berbagai kegiatan ekonomi. Di sisi lain peningkatan jumlah penduduk ternyata menuntut peningkatan kapasitas perekonomian wilayah bersangkutan agar mutu hidup dan kesejahteraan penduduknya tidak terpuruk.

Tingkat Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk

Pertumbuhan penduduk suatu wilayah pada hakekatnya dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk (migrasi). Pertumbuhan penduduk di Nusa Tenggara Timur pada awalnya lebih banyak dipengaruhi oleh tingkat kelahiran dan kematian. Namun dalam perkembangannya faktor perpindahan penduduk (migrasi) tampaknya mulai berpengaruh terhadap pertumbuhan penduduk wilayah ini.

Tabel 2.1 Laju Pertumbuhan Penduduk NTT
Menurut Kabupaten/Kota, 2010-2019

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (ribu rupiah)			Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun	
	2010	2018	2019	2010-2019	2018-2019
Sumba Barat	110,99	127,87	129,71	1,70	1,42
Sumba Timur	227,73	255,60	258,49	1,37	1,12
Kupang	304,55	397,48	403,58	3,15	1,51
Timor Tengah Selatan	441,16	465,97	467,99	0,61	0,43
Timor Tengah Utara	229,80	251,99	254,17	1,08	0,86
Belu	352,30	216,78	220,12	1,70	1,52
Alor	190,03	204,38	205,60	0,83	0,59
Lembata	117,83	140,39	143,07	2,12	1,87
Flores Timur	232,61	253,82	255,92	1,02	0,82
Sikka	300,33	318,92	320,40	0,67	0,46
Ende	260,61	272,99	273,93	0,51	0,34
Ngada	142,39	161,20	163,22	1,48	1,24
Manggarai	292,45	333,91	338,42	1,58	1,33
Rote Ndao	119,91	165,81	172,10	4,02	3,65
Manggarai Barat	221,70	269,03	274,69	2,35	2,06
Sumba Tengah	62,49	71,80	72,80	1,66	1,37
Sumba Barat Daya	284,90	338,43	344,72	2,08	1,82
Nagekeo	130,12	144,41	145,83	1,22	0,97
Manggarai Timur	252,74	283,31	287,21	1,38	1,36
Sabu Raijua	72,96	94,41	97,38	3,11	3,05
Malaka	-	189,22	191,89	1,70	1,39
Kota Kupang	336,24	423,80	434,97	2,84	2,57
NTT	4 683,83	5 371,52	5 456,20	1,66	1,55

Sumber : NTT Dalam Angka 2020

Jika diamati lebih jauh, rata-rata laju pertumbuhan penduduk untuk masing-masing kabupaten/kota pada periode 2018-2019 dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan penduduk tertinggi terjadi di Kabupaten Rote Ndao (3,65 persen) diikuti Kabupaten Sabu Raijua (3,05 persen) dan Kota Kupang (2,57 persen). Sementara itu laju pertumbuhan penduduk terendah berada di Kabupaten Ende (0,34 persen).

Pada kenyataannya, jumlah penduduk yang meninggalkan wilayah Nusa Tenggara Timur (migrasi keluar) lebih banyak dari pada jumlah penduduk yang masuk (migrasi masuk). Pengiriman tenaga kerja ke luar negeri sebagai buruh, pembantu rumah tangga dari wilayah Nusa Tenggara Timur baik secara legal maupun illegal merupakan salah satu contoh migrasi keluar. Kondisi ini pada gilirannya ikut berperan dalam menekan laju pertumbuhan penduduk NTT, selain keberhasilan program Keluarga Berencana (KB).

Pada tahun 2019, jumlah penduduk NTT bertambah sekitar 84 ribu jiwa dari keadaan tahun 2018 dengan laju pertumbuhan sekitar 1,55 persen. Peningkatan jumlah penduduk ini berimplikasi pada peningkatan kepadatan penduduk. NTT dengan luas wilayah sekitar 47.931,54 km² dan didiami oleh 5.456 ribu jiwa berarti tingkat kepadatan setiap kilometer persegi berkisar 114 jiwa. Jika ditinjau menurut kabupaten/kota, terlihat bahwa penyebaran penduduk di NTT masih tergolong belum merata. Kota Kupang merupakan daerah yang paling padat penduduknya dengan tingkat kepadatan mencapai 2.413 jiwa/km². Sedangkan Kabupaten Sumba Timur merupakan daerah dengan tingkat kepadatan yang paling rendah yaitu sebesar 37 jiwa/km².

Tingginya kepadatan penduduk di Kota Kupang ini karena Kota Kupang merupakan pusat pemerintahan provinsi. Sementara itu, Sumba Timur sebagai daerah gudang ternak wilayahnya masih cukup luas namun belum mempunyai daya tarik ekonomi. Maka dari itu untuk meningkatkan persebaran penduduk di NTT perlu dilakukan pemerataan pembangunan.

Laju pertumbuhan penduduk Nusa Tenggara Timur dalam kurun 2000-2010 adalah sebesar 2,07 persen per tahun. Angka laju pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan pada dekade sebelumnya (1990-2000) yaitu sebesar 1,74 persen, laju pertumbuhan Penduduk NTT pada periode tahun 2018-2019 kembali menurun menjadi 1,55 persen. Meskipun terjadi penurunan laju pertumbuhan penduduk, namun dengan jumlah penduduk yang cukup banyak berakibat pada pertumbuhan penduduk NTT masih cukup tinggi

Tabel 2.2 Distribusi dan Kepadatan Penduduk Provinsi NTT Menurut Kabupaten/Kota, 2019

Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km ²
Sumba Barat	2,38	176
Sumba Timur	4,74	37
Kupang	7,40	73
Timor Tengah Selatan	8,58	119
Timor Tengah Utara	4,66	95
Belu	4,03	176
Alor	3,77	70
Lembata	2,62	113
Flores Timur	4,69	146
Sikka	5,87	185
Ende	5,02	132
Ngada	2,99	95
Manggarai	6,20	177
Rote Ndao	3,15	134
Manggarai Barat	5,03	87
Sumba Tengah	1,33	40
Sumba Barat Daya	6,32	239
Nagekeo	2,67	103
Manggarai Timur	5,26	115
Sabu Raijua	1,78	211
Malaka	3,52	165
Kota Kupang	7,97	2 413
NTT	100,00	114

Sumber : NTT Dalam Angka 2020

Penduduk Menurut Kelompok Umur

Salah satu cara untuk melihat pola distribusi penduduk di suatu wilayah menurut kategori produktif (secara ekonomi) atau bukan adalah dengan melihat komposisi umur dari seluruh penduduk di wilayah tersebut. Pengelompokan ini penting terutama untuk mengetahui secara umum pola potensi penduduk dari sudut pandang ekonomi.

Tabel 2.3 Penduduk NTT Menurut Kelompok Umur, 2019

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0-4	328 079	316 568	644 647
5-9	311 256	301 914	613 170
10-14	302 492	296 068	598 560
15-19	283 693	270 167	553 860
20-24	250 268	237 968	488 236
25-29	197 764	197 131	394 895
30-34	168 179	178 139	346 318
35-39	157 865	174 822	332 687
40-44	144 234	163 575	307 809
45-49	133 670	148 180	281 850
50-54	119 231	129 872	249 103
55-59	100 749	108 510	209 259
60-64	77 787	83 154	160 941
65-69	53 896	58 929	112 825
70-74	35 955	42 306	78 261
75+	37 146	46 636	83 782
Jumlah	2 702 264	2 753 939	5 456 203

Sumber : NTT Dalam Angka 2020

Data hasil proyeksi penduduk menunjukkan jumlah penduduk NTT tahun 2019 sebanyak 5.456.203 jiwa yang terdiri dari 2.702.264 laki-laki dan 2.753.939 perempuan. Penyebaran penduduk NTT sebagian besar terkonsentrasi di 3 kabupaten yaitu Kabupaten Timor Tengah Selatan (8,58 persen), Kota Kupang (7,97 persen) dan Kabupaten Kupang (7,40 persen).

Berdasarkan kelompok umur, penduduk dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu penduduk usia produktif dan penduduk bukan usia produktif. Penduduk usia produktif adalah penduduk yang berada pada kelompok usia 15-64 tahun, sedangkan penduduk bukan kelompok usia produktif adalah penduduk yang usianya di luar rentang 15-64 tahun (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas).

Penggolongan tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa penduduk berusia 15-64 tahun secara rasional merupakan kelompok yang potensial mampu melakukan kegiatan produksi. Distribusi penduduk Nusa Tenggara Timur menurut kelompok umur dapat dilihat pada Tabel 2.3. Dari tabel tersebut tampak bahwa penduduk usia produktif di Nusa Tenggara Timur pada tahun 2019 mencapai 3.324.958 jiwa atau sebesar 60,94 persen.

Rasio Beban Tanggungan

Rasio beban tanggungan (*dependency ratio*) adalah rasio dari jumlah penduduk usia non produktif, mereka yang berumur di bawah 15 tahun dan 65 tahun ke atas terhadap jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun). Angka ini menunjukkan banyaknya penduduk usia non produktif yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif selain dirinya sendiri.

Tabel 2.4 Rasio Beban Tanggungan (*Dependency Ratio*) Penduduk Nusa Tenggara Timur Menurut Jenis Kelamin, 2019

Umur	Jenis Kelamin				Daerah				Total	
	Laki-Laki		Perempuan		Kota		Desa			
	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%
0-14	941 827	34,85	914 550	33,21	371 772	31,23	1 856 377	34,80	1 856 377	34,02
15-64	1 633 440	60,45	1 691 518	61,42	766 787	64,41	3 324 958	59,97	3 324 958	60,94
65+	126 997	4,70	147 871	5,37	51 969	4,37	274 868	5,23	274 868	5,04
0-14 & 65+	1 068 824	39,55	1 062 421	38,58	423 741	35,59	2 131 245	40,03	2 131 245	39,06
Total	2 702 264	100,00	2 753 939	100,00	1 190 528	100,00	5 456 203	100,00	5 456 203	100,00
DR	65,43		62,81		55,26		66,75		64,10	

Sumber : Publikasi Profil Ketenagakerjaan dan Pengangguran NTT 2019

Angka rasio beban tanggungan penduduk Nusa Tenggara Timur menurut jenis kelamin secara lengkap dilihat pada Tabel 2.4. Dari tabel tersebut tampak bahwa rasio beban tanggungan penduduk Nusa Tenggara Timur pada tahun 2019 mencapai 64,10 persen hal ini berarti setiap 100 penduduk usia produktif pada tahun 2019 menanggung sekitar 64 penduduk usia non produktif.

Rasio beban tanggungan antar jenis kelamin pada tahun 2019 tampak bervariasi, penduduk laki-laki memiliki rasio beban tanggungan sebesar 65,43 persen sedangkan penduduk perempuan memiliki rasio beban tanggungan relatif lebih rendah yakni sebesar 62,81 persen. Jika dilihat dari wilayahnya, rasio beban tanggungan penduduk perkotaan 55,26 dan rasio beban tanggungan penduduk pedesaan 66,75. Tiap pencari nafkah harus menyokong sejumlah besar orang dan oleh karenanya memerlukan penghasilan yang lebih besar untuk dapat keluar dari kemiskinan, utamanya laki-laki dan di pedesaan.

2.2 Angkatan Kerja

Penduduk Usia Kerja (PUK) Menurut Jenis Kegiatan Utama

Kegiatan utama PUK terbagi atas Angkatan Kerja (AK) yang aktif secara ekonomi baik bekerja maupun mencari pekerjaan; dan Bukan Angkatan Kerja (BAK) yang tidak aktif secara ekonomi baik sedang sekolah atau sibuk dengan pekerjaan rumah tangga atau alasan lainnya.

Tabel 2.5 Penduduk Usia Kerja Menurut Kegiatan dan Jenis Kelamin, 2019

Jenis Kegiatan	Laki-Laki	Perempuan	L+P	
			Jumlah	%
Angkatan Kerja	1 396 177	1 081 526	2 477 703	68,50
Bukan Angkatan Kerja	372 935	766 501	1 139 436	31,50
Total PUK	1 769 112	1 848 027	3 617 139	100,00

Sumber : Publikasi Profil Ketenagakerjaan dan Pengangguran NTT 2019

Angkatan kerja pada dasarnya merupakan kelompok penduduk yang berada pada pasar kerja, yaitu penduduk yang siap terlibat dalam kegiatan ekonomi produktif. Dalam hal ini terdiri dari mereka yang bekerja yang sudah terserap dalam pasar kerja dan yang siap terjun kedalam pasar kerja meskipun belum terserap atau disebut penganggur.

Tabel 2.6 Angkatan Kerja (AK) Menurut Jenis Kelamin dan Daerah, 2016-2019

AK	Tahun								Δ%
	2016		2017		2018		2019		
	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	
Jenis Kelamin									
Laki-Laki	1 324 755	56,29	1 357 673	56,60	1 401 844	56,38	1 396 177	56,35	1,78
Perempuan	1 028 893	43,71	1 040 936	43,40	1 084 437	43,62	1 081 526	43,65	1,69
L+P	2 353 648	100,00	2 398 609	100,00	2 486 281	100,00	2 477 703	100,00	1,74
Daerah									
Kota	506 468	21,52	478 616	19,95	523 095	21,04	553 497	3,20	3,20
Desa	1 847 180	78,48	1 919 993	80,05	1 963 186	78,96	1 924 206	1,40	1,40
K+D	2 353 648	100,00	2 398 609	100,00	2 486 281	100,00	2 477 703	1,74	1,74

Sumber : Publikasi Profil Ketenagakerjaan dan Pengangguran NTT 2019

Bukan Angkatan Kerja

Bukan Angkatan Kerja (BAK) adalah penduduk usia kerja yang pada periode referensi tidak mempunyai/melakukan aktivitas ekonomi, baik karena sedang sekolah, mengurus rumah tangga atau karena alasan lainnya (pensiun, penerima transfer/kiriman, penerima deposito/bunga bank, jompo atau alasan lain).

Tabel 2.7 Bukan Angkatan Kerja (BAK) Menurut Jenis Kelamin dan Daerah, 2016-2019

BAK	Tahun								Δ%
	2016		2017		2018		2019		
	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	
Jenis Kelamin									
Laki-Laki	337 867	32,23	339 464	31,63	329 738	31,20	372 935	32,73	3,57
Perempuan	710 560	67,77	733 783	68,37	727 100	68,80	766 501	67,27	2,59
L+P	1 048 427	100,00	1 073 247	100,00	1 056 838	100,00	1 139 436	100,00	2,88
Daerah									
Kota	281 485	26,85	343 272	31,98	335 916	31,79	347 379	30,49	7,74
Desa	766 942	73,15	729 975	68,02	720 922	68,21	792 057	69,51	1,27
K+D	1 048 427	100,00	1 073 247	100,00	1 056 838	100,00	1 139 436	100,00	2,88

Sumber : Publikasi Profil Ketenagakerjaan dan Pengangguran NTT 2019

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) menggambarkan jumlah penduduk yang bersedia secara aktif melakukan kegiatan ekonomi di suatu wilayah. TPAK diperoleh dengan cara membandingkan antara jumlah Angkatan Kerja (AK) dan Penduduk Usia Kerja (PUK). Angkatan kerja terdiri atas mereka yang terserap dalam pasar kerja atau bekerja dan yang tidak atau belum terserap disebut penganggur.

Tabel 2.8 Indikator TPAK, 2016-2019

TPAK	Tahun				Rata-Rata
	2016	2017	2018	2019	
Jenis Kelamin					
Laki-Laki	79,68	80,00	80,96	78,92	79,89
Perempuan	59,15	58,65	59,86	58,52	59,05
L+P	69,18	69,09	70,17	68,50	69,24
Daerah					
Kota	64,28	58,23	60,90	61,44	61,21
Desa	70,66	72,45	73,14	70,84	71,77
K+D	69,18	69,09	70,17	68,50	69,24

Sumber : Publikasi Profil Ketenagakerjaan dan Pengangguran NTT 2019

Profil Penduduk Yang Bekerja (Pekerja)

Bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam dalam seminggu yang lalu. Bekerja selama satu jam tersebut harus dilakukan berturut-turut dan tidak terputus. Melakukan pekerjaan dalam konsep bekerja adalah melakukan kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang atau jasa termasuk orang yang memanfaatkan profesinya untuk keperluan rumah tangga sendiri dianggap bekerja. Banyaknya penduduk yang bekerja pada tahun 2019 sebanyak 2,39 juta orang. Pertumbuhan jumlah orang bekerja rata-rata sebesar 1,71 persen per tahun. Pertumbuhan pekerja perempuan 1,73 persen, lebih tinggi dibanding laki-laki 1,70 persen. Pekerja laki-laki sebanyak 1,35 juta orang atau 56,48 persen dan perempuan 1 juta orang atau 43,52 persen.

Tabel 2.9 Penduduk Bekerja Menurut Jenis Kelamin dan Daerah, 2016-2019

Bekerja	Tahun								Δ%
	2016		2017		2018		2019		
	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	
Jenis Kelamin									
Laki-Laki	1 286 547	56,50	1 311 351	56,52	1 358 845	56,35	1 352 554	56,48	1,70
Perempuan	990 521	43,50	1 008 710	43,48	1 052 688	43,65	1 042 119	43,52	1,73
L+P	2 277 068	100,00	2 320 061	100,00	2 411 533	100,00	2 394 673	100,00	1,71
Daerah									
Kota	478 296	21,00	437 163	18,84	486 688	20,18	515 767	21,54	2,90
Desa	1 798 772	79,00	1 882 898	81,16	1 924 845	79,82	1 878 906	78,46	1,51
K+D	2 277 068	100,00	2 320 061	100,00	2 411 533	100,00	2 394 673	100,00	1,71

Sumber : Publikasi Profil Ketenagakerjaan dan Pengangguran NTT, 2019

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) adalah rasio antara jumlah penganggur terbuka terhadap angkatan kerja, memberikan indikasi tentang besarnya tingkat pengangguran dari suatu angkatan kerja. Dilihat dari jenis kelamin, TPT perempuan lebih rendah dibanding laki-laki. Hal ini menggambarkan bahwa kesempatan kerja untuk laki-laki cenderung lebih terbatas.

Tabel 2.10 Indikator TPT, 2016-2019

TPAK	Tahun				Rata-Rata
	2016	2017	2018	2019	
Jenis Kelamin					
Laki-Laki	2,88	3,41	3,07	3,12	3,12
Perempuan	3,73	3,10	2,93	3,64	3,35
L+P	3,25	3,27	3,01	3,35	3,22
Daerah					
Kota	5,56	8,66	6,96	6,82	7,00
Desa	2,62	1,93	1,95	2,35	2,21
K+D	3,25	3,27	3,01	3,35	3,22

Sumber : Publikasi Profil Ketenagakerjaan dan Pengangguran NTT, 2019

TPT NTT tahun 2019 sebesar 3,35 persen yang berarti dari 100 orang angkatan kerja terdapat 3 sampai 4 orang yang menganggur. Rata-rata TPT selama periode 2016-2019 sebesar 3,22 persen, dengan TPT Kota lebih tinggi.

Profil Penduduk Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama

Indikator ini penting untuk mengetahui sektor-sektor yang banyak menyerap tenaga kerja. Perubahan kontribusi sektor dalam menyerap tenaga kerja dalam suatu kurun waktu tertentu memberikan gambaran perubahan struktur perekonomian daerah. Lapangan usaha/pekerjaan ialah bidang kegiatan dari pekerjaan/usaha/perusahaan/kantor tempat seseorang bekerja, atau yang dihasilkan oleh perusahaan/kantor tempat responden bekerja.

Bila dilihat menurut Sembilan sektor, empat sektor menempati posisi teratas yaitu pertanian, perdagangan, industri pengolahan dan jasa Pendidikan dan kesehatan. Tenaga kerja mayoritas terserap di Pertanian 1,17 juta orang atau 48,70 persen, diikuti Sektor Perdagangan 0,26 juta orang atau 10,97 persen, Industri Pengolahan sebesar 0,24 juta orang atau 10,20 persen, dan Jasa Pendidikan dan Kesehatan 0,20 juta orang atau 8,25 persen. Sektor lainnya seperti transportasi, konstruksi, pertambangan dan lembaga keuangan dibawah 7 persen dan sektor yang menyerap tenaga kerja terendah adalah sektor Pertambangan dan Penggalian; Pengadaan LGA.

Bila dipilah menurut jenis kelamin, pekerja perempuan lebih banyak dibanding laki-laki pada sektor perdagangan dan sektor industri. Bahkan pada sektor industri tenaga kerja perempuan mendominasi 2 kali dibanding laki-laki. Pekerja perempuan di sektor industri sebanyak 176 ribu penduduk perempuan atau 16,92 persen dari seluruh pekerja perempuan sedangkan laki-laki 67 ribu atau hanya 5,20 persen dari seluruh pekerja laki-laki. Industri yang umum terdapat di NTT adalah industri tenun ikat yang dilakukan para perempuan secara tradisional dan menjadi keahlian yang diwariskan secara turun temurun bagi perempuan NTT di pedesaan.

Tabel 2.11 Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan dan Jenis Kelamin, 2019

Lapangan Pekerjaan Utama	Laki-Laki		Perempuan		L+P	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan	673 557	49,80	492 701	47,28	1 166 258	48,70
Pertambangan dan Penggalian	27 182	2,01	7 262	0,70	34 444	1,44
Industri Pengolahan	67 952	5,02	176 304	16,92	244 256	10,20
Konstruksi	131 358	9,71	4 000	0,38	135 358	5,65
Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi	115 347	8,53	147 309	14,13	262 656	10,97
Transportasi, Perdagangan, dan Komunikasi	123 139	9,10	21 323	2,04	144 462	6,03
Informasi & Komunikasi; Jasa Keuangan; dan Jasa Perusahaan	26 209	1,94	10 947	1,05	37 156	1,55
Administrasi Pemerintahan	93 419	6,91	35 814	3,44	129 233	5,40
Jasa Pendidikan dan Kesehatan	72 834	5,39	124 810	11,98	197 644	8,25
Jasa Lainnya	21 557	1,59	21 649	2,08	43 206	1,80
Total	1 352 554	100,00	1 042 119	100,00	2 394 673	100,00

Sumber : Publikasi Profil Ketenagakerjaan dan Pengangguran NTT, 2019

Jika sepuluh sektor lapangan pekerjaan utama dikelompokkan menjadi tiga sektor; sektor primer atau *agriculture* (untuk sektor pertanian), sektor sekunder atau *manufacturing* (sektor pertambangan dan penggalian, industri, listrik, gas dan air, konstruksi) dan sektor tersier atau *services* (sektor perdagangan, angkutan, keuangan dan jasa), maka sektor primer masih menempati urutan teratas dalam penyerapan tenaga kerja. Sektor ini menyerap tenaga kerja sebesar 1,17 juta orang atau 48,70 persen, diikuti sektor tersier 0,81 juta orang atau 34,01 persen dan sektor sekunder sebesar 0,41 juta orang atau 17,29 persen. Sektor tersier memiliki trend yang semakin meningkat dalam kurun waktu 2016-2019, sebaliknya pada tahun 2019 sektor primer mengalami penurunan.

Profil Penduduk Yang Bekerja (Pekerja) Menurut Status Pekerjaan Utama

Status pekerjaan adalah jenis kedudukan seseorang dalam pekerjaan, terdiri dari: berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar, berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar, buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tak dibayar. Status pekerjaan utama dari penduduk yang bekerja dapat digunakan sebagai salah satu pendekatan kegiatan formal dan informal. Dari tujuh kategori status pekerjaan utama, pendekatan kegiatan formal mencakup kategori berusaha dengan dibantu buruh tetap dan kategori buruh/karyawan, selain itu dimasukkan sebagai kegiatan informal.

Tabel 2.12 Status Pekerjaan Utama Penduduk yang Bekerja Menurut Jenis Kelamin dan Daerah, 2019

Lapangan Pekerjaan Utama	Jenis Kelamin				Daerah				Total	
	Laki-Laki		Perempuan		Kota		Desa			
	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%
Formal	421 175	31,14	236 007	22,65	280 684	54,42	376 498	20,04	657 182	27,44
Berusaha Dibantu Buruh Tetap	46 748	3,46	8 018	0,77	24 435	4,74	30 331	1,61	54 766	2,29
Buruh/ Karyawan/ Pegawai	374 427	27,68	227 989	21,88	256 249	49,68	346 167	18,42	602 416	25,16
Informal	931 379	68,86	806 112	77,35	235 083	45,58	1 502 408	79,96	1 737 491	72,56
Berusaha Sendiri	263 621	19,49	215 598	20,69	111 577	21,63	367 642	19,57	479 219	20,01
Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/ Buruh Tidak Dibayar	430 546	31,83	192 611	18,48	59 718	11,58	563 439	29,99	623 157	26,02
Pekerja Bebas	74 703	5,52	21 666	2,08	12 412	2,41	83 957	4,47	96 369	4,02
Pekerja Keluarga Tidak Dibayar	162 509	12,01	376 237	36,10	51 376	9,96	487 370	25,94	538 746	22,50
Total	1 352 554	100,00	1 042 119	100,00	515 767	100,00	1 878 906	100,00	2 394 673	100,00

Sumber : Publikasi Profil Ketenagakerjaan dan Pengangguran NTT, 2019

Profil Penduduk Yang Bekerja (Pekerja) Menurut Pendidikan

Di dalam pasar kerja, nilai tukar terpenting yaitu kemampuan dan keterampilan. Seperti nilai tukar, kemampuan bisa meningkat atau terapresiasi dan menurun atau terdepresiasi. Pendidikan berperan penting dalam peningkatan nilai tukar tenaga kerja melalui peningkatan kemampuan dan keterampilan. Pendidikan yang baik, dapat mewujudkan tenaga kerja yang memiliki nilai tukar tinggi sehingga produktif, efektif serta berdaya saing.

Tabel 2.13 Tingkat Pendidikan Penduduk yang Bekerja Menurut Jenis Kelamin dan Daerah, 2019

Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin				Daerah				Total	
	Laki-Laki		Perempuan		Kota		Desa			
	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%
<=SD	690 430	51,05	570 044	54,70	128 041	24,83	1 132 433	60,27	1 260 474	52,64
SMP	177 916	13,15	127 625	12,25	69 150	13,41	236 391	12,58	305 541	12,76
SMA UMUM	240 623	17,79	145 560	13,97	134 468	26,07	251 715	13,40	386 183	16,13
SMA KEJURUAN	95 303	7,05	48 152	4,62	56 771	11,01	86 684	4,61	143 455	5,99
DIPLOMA I/II/ III	27 297	2,02	34 951	3,35	26 645	5,17	35 603	1,89	62 248	2,60
UNIVERSITAS	120 985	8,94	115 787	11,11	100 692	19,52	136 080	7,24	236 772	9,89
Total	1 352 554	100,00	1 042 119	100,00	515 767	100,00	1 878 906	100,00	2 394 673	100,00

Sumber : Publikasi Profil Ketenagakerjaan dan Pengangguran NTT, 2019

Profil Penduduk Yang Menganggur (Penganggur)

Pengangguran mempunyai implikasi sosial yang luas karena mereka yang tidak bekerja tidak mempunyai pendapatan. Semakin tinggi tingkat pengangguran terbuka maka semakin besar potensi kerawanan sosial yang ditimbulkannya contohnya kriminalitas. Sebaliknya semakin rendah tingkat pengangguran terbuka maka semakin stabil kondisi sosial dalam masyarakat. Penganggur didefinisikan sebagai mereka yang sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (*discouraged worker*), dan sudah diterima bekerja tapi belum mulai bekerja.

Tabel 2.14 Tingkat Pendidikan Penganggur Menurut Jenis Kelamin dan Daerah, 2019

Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin				Daerah				Total	
	Laki-Laki		Perempuan		Kota		Desa			
	Absolut	%								
<=SD	8 040	18,43	3 845	8,37	3 159	8,37	8 726	19,26	11 885	14,31
SMP	4 026	9,23	3 024	5,54	2 089	5,54	4 961	10,95	7 050	8,49
SMA UMUM	15 936	36,53	12 951	32,64	12 316	32,64	16 571	36,58	28 887	34,79
SMA KEJURUAN	6 817	15,63	4 518	17,76	6 701	17,76	4 634	10,23	11 335	13,65
DIPLOMA I/II/ III	1 113	2,55	5 286	8,63	3 257	8,63	3 142	6,94	6 399	7,71
UNIVERSITAS	7 691	17,63	9 783	27,06	10 208	27,06	7 266	16,04	17 474	21,05
Total	43 623	100,00	39 407	100,00	37 730	100,00	45 300	100,00	83 030	100,00

Sumber : Publikasi Profil Ketenagakerjaan dan Pengangguran NTT, 2019

Tahun 2019, penganggur di NTT mencapai 83,03 ribu orang. Mayoritas dari penganggur berpendidikan SMA ke atas, jumlahnya sekitar 77,19 persen. Komposisi yang kurang lebih sama terlihat juga ketika penganggur dibedakan menurut jenis kelamin. Sedangkan bila ditinjau berdasarkan daerah, penganggur berpendidikan SMA ke atas mencapai 86,09 persen di kota dan sekitar 69,79 persen di desa.

BAB 3. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO



Laju Pertumbuhan
PDRB ADHK NTT
5,20%

Laju Pertumbuhan
PDRB ADHK
Indonesia
5,02%

2019

PDRB
Perkapita
NTT sebesar
19,59
Juta



Bab 3. Produk Domestik Regional Bruto



Sumber Gambar : dishut.kaliglobal.blogspot.com

Indikator yang dapat digunakan untuk melihat kondisi perekonomian suatu wilayah antara lain adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Sesuai dengan definisi, PDRB adalah jumlah seluruh barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah.

Ada dua sistem penilaian yang lazim digunakan dalam menghitung PDRB, yaitu atas dasar harga yang berlaku pada setiap tahun penghitungan dan atas dasar harga konstan pada tahun tertentu. PDRB atas dasar harga berlaku pada umumnya digunakan untuk mengamati struktur ekonomi di wilayah yang bersangkutan, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengamati pertumbuhan ekonominya.

Dalam ulasan ini selain disajikan perkembangan dan perubahan struktur ekonomi Nusa Tenggara Timur disajikan pula perkembangan PDRB per kapita. PDRB per kapita diperoleh dari total PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

3.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Timur secara umum tidak jauh berbeda dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini dapat dilihat dari Tabel 3.1 yang menyajikan pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Timur dan Indonesia periode 2015-2019.

Pertumbuhan ekonomi NTT pada tahun 2015 sebesar 4,92 persen sedangkan di tingkat nasional sebesar 4,88 persen. Selanjutnya pada tahun 2016 laju pertumbuhan ekonomi Propinsi NTT maupun nasional mengalami kenaikan menjadi 5,12 persen, hal sama juga terjadi pada pertumbuhan ekonomi nasional yang tumbuh menjadi 5,03 persen. Pada tahun berikutnya pertumbuhan ekonomi NTT mengami perlambatan menjadi 5,11 persen, sedangkan pertumbuhan ekonomi nasional mengalami peningkatan menjadi 5,07 persen.

Pada tahun 2019 tercatat seluruh lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 9,14 persen. Sementara pertumbuhan terendah pada lapangan usaha Real Estate.

Tabel 3.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Per Tahun NTT dan Indonesia (persen), 2015-2019

Periode	NTT	Indonesia
2015	4,92	4,88
2016	5,12	5,03
2017	5,11	5,07
2018*)	5,13	5,17
2019**)	5,20	5,02

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Sumber : Data PDRB Provinsi NTT Menurut Lapangan Usaha, 2015 –2019

3.2 Struktur Ekonomi Nusa Tenggara Timur

Sebagaimana umumnya perekonomian wilayah lain di Indonesia, perekonomian Nusa Tenggara Timur pada dasarnya merupakan perekonomian agraris yang dicirikan dengan besarnya peranan sektor pertanian. Dari Tabel 3.2 dapat dilihat bahwa perekonomian Nusa Tenggara Timur memiliki ketergantungan yang cukup besar terhadap sektor Pertanian.

Tabel 3.2 Peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen), 2015-2019

Lapangan Usaha		2015	2016	2017	2018*	2019**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	29,89	29,03	28,81	28,37	28,00
B	Pertambangan dan Penggalian	1,41	1,39	1,30	1,21	1,17
C	Industri Pengolahan	1,24	1,24	1,26	1,26	1,31
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,06	0,07	0,07	0,08	0,07
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05
F	Konstruksi	10,31	10,70	10,71	10,84	10,86
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,87	11,00	10,97	11,18	11,52
H	Transportasi dan Pergudangan	5,25	5,40	5,44	5,51	5,46
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,64	0,69	0,74	0,76	0,75
J	Informasi dan Komunikasi	7,20	7,02	6,83	6,63	6,62
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,93	4,01	4,12	4,11	4,03
L	Real Estate	2,70	2,60	2,55	2,50	2,32
M,N	Jasa Perusahaan	0,31	0,31	0,31	0,29	0,29
O	Administrasi/Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	12,32	12,74	12,89	13,36	13,66
P	Jasa Pendidikan	9,59	9,52	9,66	9,55	9,59
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,08	2,11	2,14	2,17	2,18
R,S,T,U	Jasa Lainnya	2,15	2,12	2,14	2,12	2,12
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Sumber : Data PDRB Provinsi NTT Menurut Lapangan Usaha, 2015 –2019

Struktur lapangan usaha sebagian masyarakat NTT masih didominasi oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan. Hal ini dapat terlihat dari besarnya peranan lapangan usaha tersebut terhadap pembentukan PDRB NTT. Pada tahun 2019, lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan memberikan sumbangan terbesar terhadap struktur ekonomi NTT (28 persen), kemudian diikuti oleh lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib (13,66 persen); lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (11,52 persen); lapangan usaha konstruksi (10,86 persen); dan lapangan usaha jasa Pendidikan (9,59 persen); Sementara itu, peranan lapangan usaha lainnya masing-masing kurang dari tujuh persen.

Kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan penyumbang terbesar nilai PDRB di NTT, kategori ini mencakup subkategori pertanian, kehutanan, dan perikanan yang terdiri dari golongan tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan, dan jasa pertanian dan perburuan; sub kategori usaha kehutanan dan penebangan kayu; dan sub kategori perikanan. Kategori ini masih menjadi tumpuan dan harapan dalam penyerapan tenaga kerja.

Jika dirinci per golongan, golongan peternakan merupakan penyumbang terbesar terhadap kategori pertanian yaitu tercatat sebesar 9,46 persen dari seluruh nilai tambah pertanian. Golongan peternakan mengalami pertumbuhan sebesar 6,36 persen pada tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 2,23 persen.

Pada tahun 2018 semua subkategori pada kategori lapangan usaha pertanian mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif kecuali jasa pertanian dan perburuan. Pertumbuhan ekonomi pada kategori ini paling besar dialami oleh subkategori peternakan yaitu sebesar 6,36 persen, kemudian diikuti oleh subkategori hortikultura sebesar 4,82 persen dan subkategori perkebunan sebesar 3,92 persen.

3.3 PDRB Per Kapita

Bila PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu PDRB Per kapita. PDRB Per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Pada tahun 2019, PDRB per kapita Nusa Tenggara Timur mencapai 19,59 juta rupiah.

Tabel 3.3 PDRB Per Kapita Menurut Lapangan Usaha (Juta Rp), 2015-2019

Lapangan Usaha		2015	2016	2017	2018*	2019**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,44	4,67	4,95	5,23	5,49
B	Pertambangan dan Penggalian	0,21	0,22	0,22	0,22	0,23
C	Industri Pengolahan	0,18	0,20	0,22	0,23	0,26
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
F	Konstruksi	1,53	1,72	1,84	2,00	2,13
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,62	1,77	1,88	2,06	2,26
H	Transportasi dan Pergudangan	0,78	0,87	0,93	1,02	1,07
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,10	0,11	0,13	0,14	0,15
J	Informasi dan Komunikasi	1,07	1,13	1,17	1,22	1,30
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,58	0,65	0,71	0,76	0,79
L	Real Estate	0,40	0,42	0,44	0,46	0,45
M,N	Jasa Perusahaan	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06
O	Administrasi/Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,83	2,05	2,21	2,47	2,68
P	Jasa Pendidikan	1,43	1,53	1,66	1,76	1,88
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,31	0,34	0,37	0,40	0,43
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,32	0,34	0,37	0,39	0,42
Produk Domestik Regional Bruto		14,87	16,09	17,17	18,45	19,59

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Sumber : Data PDRB Provinsi NTT Menurut Lapangan Usaha, 2015 –2019

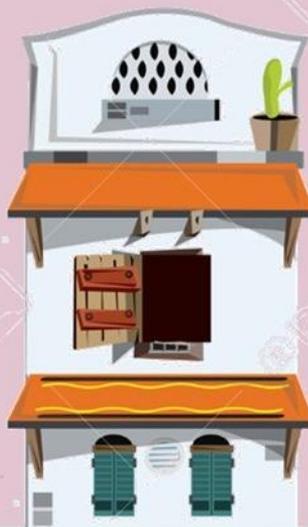
BAB 4. KEMISKINAN

Jumlah
Penduduk
Miskin NTT
2019 sebesar
1.129,46 ribu
jiwa



Pesentase Penduduk Miskin NTT
Perkotaan+Pedesaan
2019

20,62%



Bab 4. Kemiskinan



Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di negara manapun. Salah satu aspek penting untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka. Pengukuran kemiskinan yang terpercaya (*reliable*) dapat menjadi instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin.

Pengukuran kemiskinan yang dilakukan oleh BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic need approach*). Konsep ini tidak hanya digunakan oleh BPS tetapi juga oleh negara–negara lain seperti: Armenia, Senegal, Pakistan, Bangladesh, Vietnam dan Gambia. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Dengan kata lain, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan makanan maupun non makanan yang bersifat mendasar. Menurut pendekatan ini, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata–rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan (GK).

Secara teknis GK dibangun dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). GKM merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minuman makanan yang disertakan dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari, sedangkan GKNM merupakan kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.

Penduduk miskin dapat juga dihitung melalui pendekatan lain, seperti yang dilakukan oleh Bank Dunia yang menghitung jumlah penduduk miskin berdasarkan pengeluaran per kapita setara dengan US\$1 dan US\$2 PPP (*Purchasing Power Parity*/Paritas Daya Beli).

BPS melakukan penghitungan jumlah dan pesentase penduduk miskin pertama kali pada tahun 1984 yang mencakup periode 1976-1981 dengan menggunakan data survei sosial ekonomi nasional (Susenas) modul konsumsi. Sejak itu, setiap tiga tahun sekali BPS secara rutin mengeluarkan data jumlah dan pesentase penduduk miskin yang disajikan menurut daerah perkotaan dan perdesaan. Kemudian mulai tahun 2003, BPS secara rutin mengeluarkan data jumlah dan persentase penduduk miskin setiap tahun. Hal ini bisa terwujud karena sejak tahun 2003 BPS mengumpulkan data susenas panel modul konsumsi setiap bulan februari atau maret.

Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar (SPKKD) digunakan untuk memperkirakan proporsi pengeluaran masing-masing komoditi pokok non makanan. Disamping data kemiskinan yang dihitung dari data Susenas (data kemiskinan makro), BPS juga mengeluarkan data rumah tangga sasaran (RTS) berdasarkan hasil pendataan sosial ekonomi penduduk 2005 (PSE05) untuk keperluan bantuan langsung tunai (BLT), yang juga disebut sebagai data kemiskinan mikro.

4.1 Metode Penghitungan Kemiskinan

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Dengan pendekatan ini, dapat dihitung *Head Count Index*, yaitu persentase penduduk miskin terhadap total penduduk.

- Metode yang digunakan adalah menghitung GK, yang terdiri dari dua komponen, yaitu GKM dan GKBM. Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan.
- GKM merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disertakan dengan 2.100 kkalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll).
- GKBM adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan.

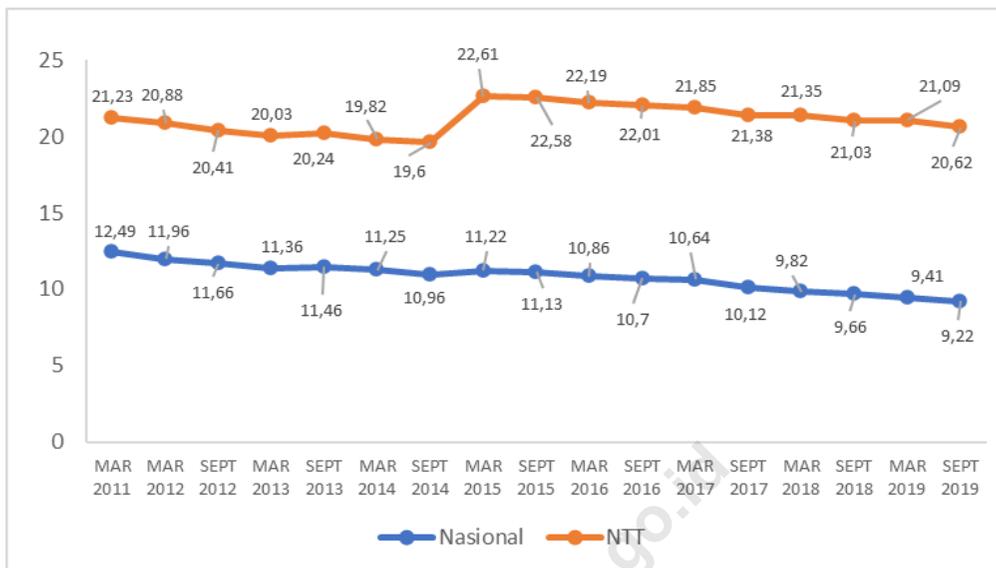
4.2 Sumber Data

Sumber data utama yang dipakai untuk menghitung tingkat kemiskinan adalah data Susenas. Sebagai informasi tambahan, juga digunakan hasil survei SPKKD, yang dipakai untuk memperkirakan proporsi dari pengeluaran masing-masing komoditi pokok bukan makanan.

4.3 Perkembangan Kemiskinan

Perkembangan angka-angka kemiskinan di Nusa Tenggara Timur tersebut mencerminkan betapa beratnya beban pemerintah dalam rangka mengentaskan kemiskinan penduduk di wilayah ini. Pemerintah memang telah berusaha dengan berbagai upaya untuk menanggulangi masalah kemiskinan.

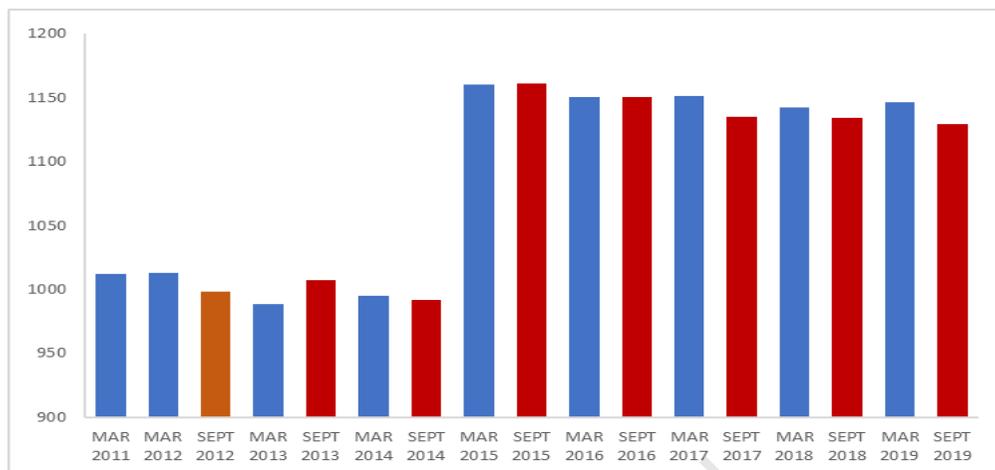
Gambar 4.1 Persentase Penduduk Miskin (P0) Nasional dan Provinsi NTT, 2011-2019



Sumber : Publikasi Ringkasan Data dan Informasi Kemiskinan Provinsi NTT, 2019

Persentase penduduk miskin di NTT mengalami penurunan sebesar 2 poin dari tahun 2011 sampai dengan September 2019. Pada tahun 2019 sebanyak 20,62 persen penduduk di NTT tercatat sebagai penduduk miskin. Angka tersebut dibandingkan dengan tahun sebelumnya menunjukkan adanya penurunan persentase penduduk miskin. Pada tahun 2017 persentase penduduk miskin NTT sebesar 21,38 persen, kemudian menurun menjadi 21,03 persen pada tahun 2018, dan terus menurun pada tahun 2019 menjadi 20,62 persen. Dibanding kemiskinan Nasional, kemiskinan NTT masih jauh lebih tinggi dibanding rata-rata Nasional sebesar 9,22 persen per tahun 2019. Upaya ekstra dari pemerintah sangat diperlukan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin.

Gambar 4.2 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin NTT, (000 orang) 2011-2019



Sumber : Publikasi Ringkasan Data dan Informasi Kemiskinan Provinsi NTT, 2019

4.4 Perubahan Garis Kemiskinan

Tabel 4.1 Garis Kemiskinan NTT, September 2018-September 2019

Daerah/Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bln)		
	Makanan	Bukan Makanan	Total
Perkotaan			
September 2018	301 643	120 213	421 855
September 2019	337 056	130 258	467 314
Perubahan Sept 18-Sept 19 (%)	11,74	8,36	10,78
Perdesaan			
September 2018	275 681	66 622	342 303
September 2019	289 037	69 974	359 011
Perubahan Sept 18-Sept 19 (%)	4,84	5,03	4,88
Kota+Desa			
September 2018	281 070	78 999	360 069
September 2019	299 476	84 286	383 762
Perubahan Sept 18-Sept 19 (%)	6,55	6,69	6,58

Sumber : Berita Resmi Statistik Profil Kemiskinan September 2019

Selama September 2018-September 2019, Garis Kemiskinan naik sebesar 6,58 persen, yaitu dari Rp. 360.069,00 per kapita per bulan pada September 2018 menjadi Rp. 383.762,00 per kapita per bulan pada September 2019.

BAB 5.

KONSUMSI DAN PENGELUARAN PENDUDUK

2019

Rata-Rata
Pengeluaran Per
Kapita Penduduk
NTT Setiap Bulan

Rp. 750.693



**28,71 % Penduduk
NTT Memiliki
Golongan
Pengeluaran
Rp.300.000 sampai
dengan Rp.499.999**

Bab 5. Konsumsi dan Pengeluaran Penduduk



Sumber Gambar : heropurba.blogspot.com

Pola konsumsi seseorang secara tidak langsung dipengaruhi oleh tingkat pendapatan orang tersebut. Semakin tinggi pendapatan seseorang pada umumnya akan semakin rendah proporsi yang digunakan untuk konsumsi makanan, sementara proporsi untuk konsumsi barang-barang non makanan (termasuk barang mewah) justru akan meningkat. Sebaliknya bagi penduduk yang berpendapatan rendah, sebagian besar pendapatannya akan habis digunakan untuk membiayai konsumsi makanannya. Berdasarkan kenyataan ini maka sangat masuk akal untuk menggunakan pola konsumsi sebagai salah satu indikator dalam mengukur tingkat kesejahteraan penduduk.

Pengeluaran penduduk NTT masih didominasi oleh pengeluaran untuk makanan yang proporsinya mencapai 57,21 persen pada tahun 2019. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, proporsi pengeluaran penduduk untuk makanan menunjukkan peningkatan. Sementara itu, untuk konsumsi rumah tangga bukan makanan persentasenya turun sebesar 0,04 poin jika dibandingkan dengan tahun 2018. Kondisi ini menunjukkan terjadinya pergeseran pola konsumsi atau pengeluaran dari waktu ke waktu seiring dengan peningkatan pendapatan. Pola pengeluaran dapat digunakan sebagai alat dalam menilai tingkat kesejahteraan penduduk secara ekonomi.

5.1 Pola Pengeluaran/Konsumsi Penduduk

Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk Nusa Tenggara Timur pada tahun 2017 sebesar 681.483 rupiah, kemudian meningkat menjadi 704.754 rupiah pada tahun 2018, dan meningkat lagi menjadi 750.693 rupiah pada tahun 2019. Jika diperhatikan komposisinya, ternyata proporsi konsumsi untuk makanan masih relatif besar. Pada tahun 2017 proporsi konsumsi makanan penduduk Nusa Tenggara Timur mencapai 58,59 persen dari seluruh pengeluarannya, kemudian pada tahun 2018 turun menjadi 57,17 persen, dan pada tahun 2019 naik menjadi 57,21 persen. Kondisi ini memberikan gambaran umum bahwa tingkat kesejahteraan penduduk Nusa Tenggara Timur masih belum cukup baik.

Sementara itu jika diamati lebih jauh, konsumsi non makanan penduduk Nusa Tenggara Timur masih didominasi oleh pengeluaran untuk perumahan dan fasilitas rumah kemudian diikuti berturut-turut oleh kelompok aneka barang dan jasa; pakaian alas kaki dan tutup kepala; barang tahan lama; pajak, pungutan dan asuransi; keperluan pesta dan upacara; kesehatan dan pendidikan. Pengeluaran untuk perumahan ini selama tiga tahun terakhir sekitar 20 persen lebih, atau mencapai seperlima dari pengeluaran total, sedangkan pengeluaran untuk barang dan jasa mencapai 9-10 persen. Di sisi lain, pengeluaran non makanan lain yang bersifat mewah seperti pakaian, barang tahan lama, pajak dan asuransi serta pesta dan upacara proporsinya masih kecil. Bahkan, pengeluaran untuk pajak dan asuransi nilainya masih kurang dari 4 persen. Gambaran ini semakin mempertegas kenyataan bahwa tingkat kesejahteraan di Nusa Tenggara Timur belum ‘menggembirakan’ walaupun terjadi peningkatan pengeluaran rata-rata per kapita sekitar 6 persen pada tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018.

Tabel 5.1 Distribusi Pengeluaran Rata-Rata Per Kapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran di NTT, 2018-2019

Jenis Pengeluaran	2018		2019	
	Nilai	%	Nilai	%
A. Makanan	402 922	57,17	429 498	57,21
B. Bukan Makanan	301 832	42,83	321 195	42,79
Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga	165 663	23,51	170 219	22,67
Aneka Komoditas dan Jasa	70 135	9,95	78 455	10,45
Pakaian, Alas Kaki, dan Tutup Kepala	15 121	2,15	17 419	2,32
Komoditas Tahan Lama	23 826	3,38	28 959	3,86
Pajak , Pungutan, dan Asuransi	20 127	2,86	20 177	2,69
Keperluan Pesta dan Upacara	6 960	0,99	5 967	0,79
Jumlah	704 754	100,00	750 693	100,00

Sumber : NTT Dalam Angka, 2020

5.2 Distribusi Penduduk Menurut Kelompok Pengeluaran

Pendapatan penduduk sebenarnya merupakan ukuran yang lebih ideal untuk melihat tingkat kesejahteraan penduduk. Namun demikian dalam praktek ditemui berbagai kendala untuk memperoleh data pendapatan yang sah. Untuk mengatasi hal ini maka digunakan pendekatan lain, yaitu melalui data pengeluarannya.

Sebaran rumah tangga di Nusa Tenggara Timur menurut kelompok pengeluaran per kapita sebulan adalah seperti yang disajikan pada Tabel 5.2. Berdasarkan tabel tersebut selanjutnya dapat dilihat telah terjadi pergeseran persentase rumah tangga untuk tiap-tiap kelompok pengeluaran dalam kurun 2018-2019, dimana pada tahun 2019 kelompok pengeluaran di atas 500.000 mengalami kenaikan sedangkan kelompok pengeluaran di bawah 500.000 mengalami penurunan.

Tabel 5.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Golongan Pengeluaran Per Kapita Per Bulan, 2018-2019

Golongan Pengeluaran	%	
	2018	2019
<150.000	0,04	0,03
150.000-199.999	1,01	0,70
200.000-299.999	12,05	10,94
300.000-499.999	32,13	28,71
500.000-749.999	23,50	24,52
750.000-999.999	14,51	15,30
1.000.000-1.499.999	10,15	12,08
≥1.500.000	6,62	7,72
Jumlah	100,00	100,00

Sumber : NTT Dalam Angka, 2020

Kelompok rumah tangga dengan pengeluaran Rp.300.000-Rp.499.999 per kapita per bulan merupakan yang terbanyak di tahun 2019. Sekitar 28,71 persen rumah tangga berada di kelompok tersebut dari seluruh rumah tangga di NTT. Di tahun sebelumnya proporsi kelompok tersebut sekitar 32,13 persen. Gambaran tersebut secara tidak langsung menunjukkan bahwa secara umum pengeluaran penduduk Nusa Tenggara Timur pada kurun 2018–2019 bergerak ke arah yang lebih baik.

BAB 6.

IHK, INFLASI DAN NTP

0,67%

Inflasi NTT Tahun 2019



2,18%

Inflasi terbesar pada kelompok pengeluaran Pendidikan



Bab 6. IHK, Inflasi dan NTP



Beberapa indikator utama yang digunakan untuk mengamati kondisi perekonomian makro suatu wilayah antara lain adalah harga, indeks harga dan laju inflasi. Indikator-indikator tersebut antara lain dapat dimanfaatkan sebagai masukan dalam menyusun berbagai kebijakan yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan penduduk.

Tingkat harga suatu komoditas pada dasarnya dipengaruhi oleh mata rantai perdagangan dari komoditas yang bersangkutan. Semakin panjang mata rantainya pada umumnya akan semakin mahal pula harganya, karena semakin banyak pula margin atau keuntungan pedagang yang ditambahkan ke dalam harga komoditas yang bersangkutan. Berdasarkan mata rantai perdagangan tersebut maka BPS menggolongkan harga menjadi harga produsen (yaitu harga yang diterima oleh produsen barang/jasa) dan harga konsumen (yaitu harga barang/jasa yang harus dibayar oleh konsumen). Di samping itu harga suatu komoditas juga dipengaruhi oleh banyaknya (kuantitas) dari komoditas yang diperdagangkan. Semakin besar kuantitas dari suatu komoditas yang diperdagangkan pada umumnya akan semakin murah harganya. Berdasarkan kenyataan tersebut maka BPS juga menggolongkan harga ke dalam harga perdagangan besar dan harga eceran. Bab ini akan mencoba mengulas indeks harga konsumen, laju inflasi, dan Nilai Tukar Petani (NTP).

6.1 Indeks Harga Sembilan Bahan Pokok

Data Indeks Harga Konsumen (IHK) NTT pada tahun 2019 adalah seperti yang disajikan dalam Tabel 6.1. IHK umum tertinggi terjadi pada bulan Desember (139,07). Jika diperhatikan kelompok komoditasnya, dapat dilihat bahwa IHK untuk makanan jadi merupakan yang tertinggi (154,75), diikuti IHK untuk transport (143,01).

Tabel 6.1 Indeks Harga Konsumen NTT Menurut Kelompok Komoditas, 2019

Kelompok Pengeluaran	IHK Desember 2018	IHK Desember 2019	Inflasi 2018	Inflasi 2019
Bahan Makanan	128,44	129,41	3,89	0,75
Makanan Jadi,dll	152,79	154,75	2,63	1,28
Perumahan, dll	130,36	130,37	1,45	0,01
Sandang	130,32	133,27	0,51	2,26
Kesehatan	119,05	120,91	1,15	1,56
Pendidikan,dll	134,72	137,66	1,56	2,18
Transpor,dll	143,59	143,01	6,61	-0,40
NTT	134,70	135,59	3,07	0,67
Nasional	135,39	139,07	3,13	2,72

Sumber : Kumpulan Berita Resmi Statistik Perkembangan IHK NTT, 2019

6.2 Laju Inflasi

Secara umum laju inflasi merupakan ukuran yang menunjukkan besarnya perubahan harga dalam selang waktu tertentu. Jika laju inflasi memiliki nilai positif (lebih besar dari 0) maka secara umum harga yang harus dibayar menjadi lebih mahal, begitu juga sebaliknya.

Laju inflasi pada dasarnya dapat dihitung untuk setiap jenis barang. Namun demikian dalam pengertian yang umum digunakan, laju inflasi hanyalah mengukur perubahan harga konsumen, yaitu harga yang harus dibayar oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya. Untuk keperluan penghitungan harga konsumen ini BPS menggunakan sekitar 280 komoditi yang terbagi ke dalam 7 kelompok pengeluaran.

Berdasarkan data IHK memang dapat diketahui perkembangan perubahan harga dari waktu ke waktu. Namun demikian ukuran ini tidak mampu secara langsung menunjukkan berapa besar perubahan yang terjadi pada selang waktu tertentu. Untuk keperluan yang terakhir ini pada umumnya digunakan laju inflasi, yaitu suatu besaran yang menunjukkan persentase perubahan harga pada suatu waktu tertentu dibandingkan dengan harga pada waktu sebelumnya. Laju inflasi sering juga digunakan sebagai indikator untuk mengamati stabilitas ekonomi, khususnya dari sisi harga. Semakin tinggi tingkat inflasi suatu barang menunjukkan semakin besar perubahan harga yang terjadi untuk barang tersebut.

Data laju inflasi suatu daerah pada umumnya disajikan dalam dua bentuk, yaitu bulanan dan tahunan. Laju inflasi bulanan menunjukkan persentase perubahan harga pada suatu bulan terhadap bulan sebelumnya, sedangkan laju inflasi tahunan menunjukkan persentase perubahan harga pada bulan Desember suatu tahun dibandingkan dengan harga pada bulan Desember tahun sebelumnya (pendekatan ini dikenal dengan metode *point to point* dalam menghitung inflasi).

Laju inflasi bulanan di Nusa Tenggara Timur dan Nasional sepanjang tahun 2019 adalah seperti yang disajikan pada Tabel 6.3. Laju inflasi NTT lebih rendah daripada level nasional di tahun 2018 yaitu sebesar 3,07 persen, sedangkan untuk level nasional sebesar 3,13 persen.

Untuk Nusa Tenggara Timur, inflasi tertinggi terjadi pada bulan Desember dan yang terendah terjadi pada bulan Februari. Tingginya laju inflasi pada bulan Desember tersebut utamanya bersumber dari melonjaknya harga-harga pada kelompok bahan makanan sebesar 2,02 persen. Sementara deflasi yang terjadi pada bulan Februari 2019 sepertinya merupakan akibat dari penurunan harga yang cukup tajam pada kelompok transport, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 1,52 persen.

Tabel 6.2 Indeks Harga Konsumen Bulanan NTT dan Nasional, 2019

Bulan	Bahan Makanan	Makanan Jadi, Minuman, rokok dan Tembakau	Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar	Sandang	Kesehatan	Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga	Transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	Umum	
								NTT	Nasional
Januari	130,52	153,48	130,45	130,73	119,20	135,01	141,47	135,00	135,83
Februari	129,02	153,28	130,60	130,64	119,70	135,02	139,26	134,30	135,72
Maret	127,29	153,40	130,40	130,97	119,83	134,98	139,75	133,90	135,87
April	129,19	153,47	130,36	130,91	120,36	135,00	140,77	134,58	136,47
Mei	129,25	153,44	130,20	131,46	120,32	134,98	143,14	134,98	137,40
Juni	127,81	153,92	130,25	131,83	120,22	134,91	143,12	134,72	138,16
Juli	127,80	154,02	130,24	132,25	120,47	137,40	143,41	135,00	138,59
Agustus	126,23	153,99	130,23	132,68	120,61	137,39	143,32	134,61	138,75
September	124,77	154,07	130,11	132,90	120,84	137,70	141,51	133,94	138,37
Oktober	125,01	154,27	130,25	132,80	120,94	137,67	141,58	134,09	138,40
Nopember	126,84	154,37	130,28	132,94	120,96	137,66	141,09	134,51	138,60
Desember	129,41	154,75	130,37	133,27	120,91	137,66	143,01	135,59	139,07

Sumber : NTT Dalam Angka, 2020

Tabel 6.3 Inflasi NTT dan Nasional, 2018-2019

Kelompok	NTT		Nasional	
	2018	2019	2018	2019
Bahan Makanan	3,89	0,75	3,41	4,28
Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau	2,63	1,28	3,91	3,97
Perumahan, dll	1,45	0,01	2,43	1,75
Sandang	0,51	2,26	3,59	4,93
Kesehatan	1,15	1,56	3,14	3,46
Pendidikan, dll	1,56	2,18	3,15	3,25
Transport, dll	6,61	-0,40	3,16	0,17
Umum	3,07	0,67	3,13	0,34

Sumber : Kumpulan Berita Resmi Statistik Perkembangan IHK NTT, 2019

6.3 Nilai Tukar Petani (NTP)

Perkembangan harga yang telah diulas terdahulu hanya menunjukkan fluktuasi harga masing-masing komoditas dan tidak serta merta dapat dimanfaatkan untuk melihat perkembangan tingkat kesejahteraan petani. Untuk keperluan yang terakhir tersebut, BPS telah mengembangkan dan melakukan penghitungan indeks harga yang diterima petani, indeks harga yang dibayar petani, dan nilai tukar petani.

Indeks harga yang diterima petani tahun 2016-2018 adalah perbandingan harga berbagai komoditas pertanian yang dihasilkan oleh petani pada suatu tahun dibandingkan harga-harga komoditas pada tahun 2012 sebagai tahun dasar. Komoditas yang diamati harganya secara umum dapat digolongkan menjadi harga komoditas tanaman bahan makanan dan harga komoditas hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan.

Tabel 6.4 Nilai Tukar Petani di Provinsi NTT, 2016-2018

Perincian	2016	2017	2018
Inflasi (%)	3,02	3,27	2,65
Nilai Tukar Petani	101,07	102,18	105,86
Indeks Diterima Petani	122,27	128,77	136,21
Indeks Dibayar Petanin	120,97	126,02	128,67

Sumber : Publikasi dan BRS NTP NTT, 2019

Indeks harga yang dibayar petani tahun 2019 merupakan perbandingan harga berbagai barang dan jasa yang harus dibayar oleh petani, baik untuk keperluan konsumsi maupun untuk keperluan produksi dan penambahan barang modal pada suatu tahun dibandingkan harga pada tahun dasar (2018). Komoditas untuk keperluan konsumsi antara lain mencakup makanan, perumahan, pakaian, dan aneka barang dan jasa. Sedangkan untuk faktor produksi, antara lain terdiri dari upah, cangkul dan sabit.

Nilai tukar petani adalah perbandingan antara indeks harga yang dibayar dengan indeks harga yang diterima petani. Angka ini secara langsung menunjukkan daya tukar berbagai produk yang dihasilkan oleh petani dengan berbagai produk yang diperlukan oleh petani.

Ada sementara pihak yang beranggapan bahwa nilai tukar petani bahkan dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengamati tingkat kesejahteraan petani. Akibat dari pola perkembangan kedua jenis indeks harga tersebut adalah perubahan daya tukar berbagai produk pertanian yang diterima oleh petani terhadap harga berbagai barang dan jasa kebutuhan petani.

Nilai Tukar Petani (NTP) secara teknis dipahami sebagai hasil perbandingan antara indeks harga yang diterima dan dibayar petani. Oleh karena itu NTP menjadi indikator untuk mengukur tingkat kemampuan/daya beli dan daya tukar produk yang dihasilkan/dijual petani dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani baik untuk proses produksi maupun untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga.

Pada tahun 2019 NTP di NTT sebesar 97,07. NTP yang kurang dari 100 berarti bahwa pendapatan petani lebih kecil dibandingkan pengeluarannya. Pendapatan petani di NTT pada tahun 2019, tidak dapat menutupi biaya produksi dan konsumsi lain dari petani karena harga produk yang diterima petani (100,46) lebih kecil dibandingkan barang konsumsi yang dibayarkan oleh petani (100,49).

Bila dicermati menurut sub sektor, sebagian besar petani pada sub sektor pendapatannya lebih kecil dibanding pengeluarannya. Hal ini terlihat dari NTP untuk sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan yang nilainya masing-masing mencapai 95,65; 99,81; 97,64; 101,62; dan 97,09. Dari kelima sub sektor tersebut, pada tahun 2019 hanya sub sektor peternakan yang nilainya lebih dari 100. Bisa dikatakan jika sub sektor peternakan lebih menguntungkan petani dibanding sub sektor lainnya.

Berdasarkan hasil pemantauan harga-harga perdesaan di NTT, pada tahun 2019, secara umum NTP per bulannya tidak mengalami perubahan ekstrim dengan nilai selalu di bawah 100 pada periode Januari-Desember 2019. Hal ini berarti secara umum petani di NTT mengalami defisit, dimana pendapatannya lebih kecil dari pengeluaran. Dapat disimpulkan juga jika kesejahteraan petani pada tahun 2019 mengalami penurunan.

BAB 7.

PERKEMBANGAN SEKTOR PRODUKSI

Produksi Padi Sawah 2019
Menurun

-6,87%



Produksi Sapi 2019 Meningkatkan



Produksi Jagung 2019 Meningkatkan



5,87%

4,16%

Bab 7. Perkembangan Sektor Produksi



Sumber Gambar : st2013.bps.go.id

Data statistik pertanian (padi, palawija, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan) merupakan salah satu indikator ketersediaan pangan wilayah. Perhitungan produksi padi dan palawija secara nasional dilakukan oleh BPS bekerjasama dengan Departemen Pertanian untuk melaksanakan cara perhitungan produksi tanaman pangan yang sama agar diperoleh hasil yang seragam dan tepat sehingga dapat digunakan secara nasional. Tujuan penyediaan data produksi padi dan palawija secara berkesinambungan adalah untuk menyediakan informasi yang akurat dan terkini bagi kebutuhan pemerintah dan masyarakat umum.

Diharapkan data tersebut dapat digunakan untuk bahan perencanaan/ perumusan kebijakan berkaitan dengan ketahanan pangan nasional, sekaligus sebagai bahan untuk melakukan evaluasi terhadap hasil-hasil pembangunan sektor pertanian, khususnya sub sektor tanaman pangan. Data pokok untuk menghitung produksi padi dan palawija adalah data luas panen dan produktivitas. Disamping itu untuk mengoreksi hasil penghitungan luas panen diperlukan pula data luas lahan rusak/poso, luas tanam dan luas baku lahan sawah. Secara sederhana penghitungan produksi padi atau palawija merupakan hasil perkalian antara luas panen dengan produktivitas.

7.1 Sektor Pertanian

Pengusahaan tanaman pangan bertujuan untuk mewujudkan kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan dengan gizi yang cukup bagi penduduk untuk menjalani hidup yang sehat dan produktif dari hari ke hari. Seiring dengan bertambahnya penduduk dan perubahan pola makan penduduk di NTT maka ketersediaan pangan harus ditingkatkan, baik dalam jumlah, kualitas maupun keragamannya. Terkait dengan hal ini, maka masalah utama pembangunan pangan di NTT adalah optimalisasi pemanfaatan sumber daya domestik dan peningkatan kapasitas produksi pangan daerah agar produksi pangan domestik dapat tumbuh seiring dengan perkembangan kebutuhan pangan yang terus meningkat.

Tanaman Padi

Dilihat dari lahan tempat pengusahaan, padi dibedakan menjadi padi sawah dan padi ladang. Tabel 7.1 memperlihatkan bahwa produksi, luas panen dan produktivitas padi sawah lebih besar dibandingkan padi ladang. Hal ini menunjukkan bahwa pengusahaan padi sawah lebih intensif dibanding padi ladang.

Tabel 7.1 Perkembangan Luas Panen, Rata-Rata Produksi, dan Produksi Padi , 2017-2019

Uraian	Luas Panen		Rata-Rata Produksi		Produksi (Ton)	
	Hektar	Perkembangan (%)	Kw/ Ha	Perkembangan (%)	GKG	Perkembangan (%)
Padi Sawah						
2017	220 790	0,08	40,15	0,40	886 560	0,48
2018	247 759	12,21	43,07	7,27	1 067 121	20,37
2019	233 252	-5,86	42,61	-1,07	993 791	-6,87
Padi Ladang						
2017	87 366	18,07	23,48	32,00	205 119	118,64
2018	91 302	4,51	22,16	-5,62	298 509	-1,38
2019	102 356	12,11	29,16	31,59	298 509	47,57

Sumber : Publikasi Statistik Pertanian, 2019

Tanaman Palawija

Jagung merupakan salah satu komoditi palawija lokal yang sangat potensi di NTT di mana sebagian besar penduduknya mengusahakan komoditi ini. Untuk tahun 2019 dengan luas panen 335,90 ribu hektar, produksi jagung NTT meningkat dibandingkan tahun 2018, yaitu dari 848,99 ribu ton menjadi 884,32 ribu ton. Komoditi terbesar kedua untuk wilayah NTT adalah ubi kayu. Ubi kayu merupakan salah satu pangan pengganti yang sering dikonsumsi masyarakat NTT. Pada tahun 2019, produksi ubi kayu di NTT sebanyak 599,30 ribu ton dari areal panen seluas 47,90 ribu hektar dengan produktivitas sebesar 125,11 kw/Ha.

Tabel 7.2 Perkembangan Luas Panen, Rata-Rata Produksi, dan Produksi Tanaman Palawija, 2018-2019

Uraian	Luas Panen		Rata-Rata Produksi		Produksi (Ton)	
	Hektar	Perkembangan (%)	Kw/Ha	Perkembangan (%)	GKG	Perkembangan (%)
Jagung						
2018	336 208	7,36	25,25	-2,36	848 998	4,84
2019	335 901	-0,09	26,33	4,28	884 326	4,16
Kedelai						
2018	17 993	259,43	11,72	-6,91	21 085	234,52
2019	6 429	-64,27	7,78	-33,62	5 003	-76,27
Kacang Tanah						
2018	11 564	-2,82	8,68	-1,14	10 040	-3,88
2019	15 104	30,61	9,41	8,41	14 212	41,55
Kacang Hijau						
2018	12 236	13,22	6,51	-2,69	7 966	10,15
2019	13 830	13,03	5,09	-21,81	7 042	-11,60
Ubi Kayu						
2018	51 180	-13,59	118,74	-14,56	607 694	-26,17
2019	47 904	-6,40	125,11	5,36	599 304	-1,38
Ubi Jalar						
2018	6 229	-34,11	73,63	-4,60	45 865	-37,13
2019	5 178	-16,87	75,51	2,55	39 097	-14,76

Sumber : Publikasi Statistik Pertanian, 2019

Hortikultura

Perkembangan produksi sayur-sayuran periode 2017-2019 umumnya meningkat. Jenis sayur-sayuran yang paling banyak produksinya di tahun 2019 adalah labu siam yaitu sebesar 174,17 ribu kwintal. Tercatat bawang daun, kentang, kacang merah, labu siam, dan petai yang mengalami penurunan produksi di tahun 2019.

Tabel 7.3 Perkembangan Produksi Sayur-Sayuran (kwintal), 2017-2019

Jenis Sayuran-Sayuran	2017	2018	2019
Bawang Merah	77 721	45 415	82 540
Bawang Putih	2 165	4 522	8 683
Bawang Daun	6 376	11 807	8 513
Kentang	8 271	6 973	5 295
Kubis	43 213	34 491	42 507
Kembang Kol	5 444	7 073	8 832
Petsai/Sawi	86 544	101 878	129 882
Wortel	27 268	29 051	34 201
Lobak	220	-	449
Kacang Merah	5 429	5 736	4 079
Kacang Panjang	30 365	28 388	37 465
Cabe Besar	24 763	18 636	29 201
Cabe Rawit	52 278	52 474	88 160
Tomat	67 162	54 652	99 496
Terung	100 749	82 837	120 760
Buncis	27 749	26 973	37 979
Ketimun	33 634	39 426	52 615
Labu Siam	253 791	193 866	174 175
Kangkung	75 052	83 707	134 238
Bayam	26 291	32 443	37 240
Melinjo	129	589	591
Petai	1 274	3 292	3 174

Sumber : Publikasi Statistik Pertanian, 2019

Tabel 7.4 Perkembangan Produksi Buah-Buahan (ton),
2017-2019

Jenis Buah-Buahan	2017	2018	2019
Alpukat	96 392	121 888	116 825
Belimbing	6 110	5 924	7 555
Duku	175	148	160
Durian	10 885	20 073	15 742
Jambu Biji	32 654	40 071	38 755
Jambu Air	4 447	5 950	10 010
Jeruk	214 957	231 137	297 272
Mangga	425 084	472 918	518 447
Manggis	54	205	38
Nangka	154 750	193 396	210 496
Nenas	53 536	48 652	78 093
Pepaya	514 461	550 672	678 789
Pisang	929 884	1 051 292	2 274 612
Rambutan	21 944	33 643	37 537
Salak	10 061	13 037	10 465
Sawo	5 596	6 872	8 073
Markisa	256	718	1 653
Sirsak	23 544	21 280	26 655
Sukun	28 544	26 845	8 322
Melon	1 889	350	42 300
Semangka	7 665	10 986	279

Sumber : Publikasi Statistik Pertanian, 2019

Sama seperti tahun sebelumnya, tanaman pisang memberikan kontribusi terbesar pada produksi buah-buahan di NTT. Produksi pisang tahun 2019 terbanyak terdapat di Kabupaten Manggarai Timur 514.250 ton (22,61 persen), menyusul Kabupaten Sikka sebanyak 456.244 ton (20,06 persen) dan Kabupaten Malaka 382.441 ton (16,81 persen). Tanaman pepaya merupakan tanaman dengan produksi terbesar kedua yaitu sebanyak 678.789 ton. Tanaman ketiga produksi terbesar adalah tanaman mangga. Produksi mangga tahun 2019 adalah sebesar 518.447 ton.

Tabel 7.5 Produksi Tanaman Obat-Obatan (kg), 2017-2019

Jenis Tanaman	2017	2018	2019
Jahe	1 446 366	1 062 736	1 159 878
Laos/Lengkuas	671 200	529 590	2 933 639
Kencur	184 793	111 183	488 075
Kunyit	1 699 191	816 320	3 708 139
Lempuyang	1 854	979	2 914
Temulawak	87 575	98 067	61 591
Temuireng	2 325	6 787	11 261
Temukunci	21	49	5 170
Dlingo	2 583	368	74
Kapulaga	223	2 181	423
Mengkudu	4 550	27 421	28 395
Mahkota Dewa	6 435	21 405	18 764
Keji Beling	115	158	373
Sambiloto	267	592	2 184
Lidah Buaya	239	661	1 159 878

Sumber : Statistik Pertanian 2019

Perkebunan

Sub sektor perkebunan merupakan salah satu sub sektor pertanian yang banyak menyerap tenaga kerja dan penghasil devisa. Hasil sub sektor perkebunan juga sebagai bahan baku untuk industri pengolahan, selain itu dapat berperan sebagai pelestarian lingkungan hidup. Kegiatan sub sektor perkebunan di NTT yang meliputi perkebunan besar dan perkebunan rakyat sampai akhir tahun 2019 terhitung masih kecil kontribusinya terhadap sektor pertanian. Namun demikian hasil dari sub sektor ini diharapkan dapat menunjang pendapatan asli NTT dan penggerak perekonomian daerah karena komoditi perkebunan merupakan bahan baku bagi sektor industri seperti komoditi cengkeh, kelapa, kopi, kakao, dan sebagainya. Komoditi yang memiliki produksi yang besar di NTT pada tahun 2019 adalah kelapa, kopi, dan kakao.

Kelapa

Kelapa merupakan tanaman perkebunan rakyat yang banyak diusahakan masyarakat petani di NTT. Hal ini terlihat bahwa produksi kelapa di NTT selama 5 tahun terakhir 2016-2019 mengalami peningkatan rata-rata 0,54 persen per tahun. Peningkatan tersebut disebabkan meningkatnya produksi kelapa yang terjadi di Pulau/Daratan Timor, Alor dan Flores masing-masing sebesar 0,72 persen; 0,59 persen; dan 0,45 persen. Produksi kelapa tahun 2019 terbanyak di Kabupaten Sikka yakni lebih dari 19 ribu ton.

Kopi

Komoditi kopi mempunyai prospek yang cukup cerah, baik sebagai pendukung peningkatan devisa maupun peningkatan pendapatan masyarakat. Perkembangan produksi kopi dalam kurun waktu 4 tahun terakhir rata-rata mengalami peningkatan sebesar 3,01 persen per tahun. Peningkatan ini terjadi di seluruh daratan di NTT. Pada tahun 2019 komoditi kopi terbanyak di daratan Flores dengan produksi sebanyak 19.688 ton (82,79 persen) dari total produksi seluruh NTT dan menyebar hampir merata di daratan Flores.

Kakao

Komoditi kakao mempunyai banyak khasiat sebagai bahan pembuatan makanan maupun minuman. Oleh karena itu budidaya komoditi ini terus meningkat akibat semakin banyaknya permintaan terhadap kakao. Hal ini terlihat dari hasil produksi kakao yang menempati urutan ketiga setelah kelapa dan kopi. Produksi komoditi ini terbanyak di daratan Flores dengan produksi sebanyak 18.214 ton atau 91,93 persen dari total produksi seluruh NTT dan menyebar hampir merata di daratan Flores. Dalam kurun waktu 4 tahun terakhir di NTT terjadi peningkatan produksi kakao dengan rata-rata sebesar 1,45 persen per tahun.

Peternakan

Seiring dengan meningkatnya pendapatan penduduk, peran sub sektor peternakan terasa semakin penting, karena penduduk yang semula lebih banyak mengkonsumsi karbohidrat bergeser ke arah konsumsi daging, telur dan susu, akibatnya kebutuhan daging terus meningkat. Untuk itu penting untuk peningkatan produksi ternak dan hasilnya guna mencukupi permintaan domestik yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Pemerintah NTT terus berupaya melakukan diversifikasi ternak dalam rangka peningkatan populasi dan produksi ternak. Jenis ternak yang diusahakan yaitu sapi, kerbau, kambing/domba, dan babi. Masyarakat juga memelihara beberapa unggas seperti ayam ras, ayam buras, dan itik.

Dilihat dari penyebaran menurut pulau, terlihat sebagian besar sapi potong terkonsentrasi di Pulau Timor, diikuti Flores, Sumba dan Alor. Meskipun Sumba Timur berpotensi sebagai daerah pengembangan sapi karena memiliki lahan bahan pakan ternak yang berupa padang savanna luas, dan terdapat berbagai jenis rumput, namun ternyata populasi sapi di Sumba Timur hanya mencapai 5,06 persen dari populasi sapi potong di NTT dan menduduki peringkat ketujuh, untuk peringkat pertama adalah Kabupaten Kupang yang mencapai 22 persen, diikuti TTS, TTU dan Malaka. Populasi sapi potong terendah berada di Kabupaten Sumba Barat.

Jenis ternak besar berikutnya adalah kerbau dengan tingkat jumlah populasi sebanyak 174.903 ekor. Penyebaran ternak kerbau terkonsentrasi di Pulau Sumba yaitu 45,97 persen dan Flores sekitar 34,95 persen. Populasi kerbau penyebarannya relatif tidak merata, karena ternak ini hanya cocok hidup pada daerah tinggi dan rawa-rawa. Daerah-daerah yang kering atau curah hujannya seperti Alor, Flores Timur, dan Lembata kurang cocok untuk pemeliharaan sehingga daerah ini populasi kerbaunya sedikit.

Selanjutnya yaitu ternak kecil yang banyak diusahakan oleh masyarakat NTT adalah babi dan kambing. Jenis ternak babi sangat potensial untuk dikembangkan, karena pemeliharaannya yang tidak sulit dan memanfaatkan limbah rumah tangga sebagai pakannya.

Tabel 7.6 Populasi Ternak/Unggas dan Perubahannya, 2018-2019

Jenis Ternak	2018	2019	Pertumbuhan per tahun (%)
Sapi	1 027 310	1 087 644	5,87
Kerbau	161 938	174 903	8,01
Kuda	101 250	109 355	8,00
Kambing/ Domba	735 380	884 239	20,24
Babi	2 025 412	2 432 501	20,10
Ayam Kampung	10 561 329	10 984 790	4,01
Itik/Itik Manila	294 444	324 938	10,36

Sumber : Publikasi NTT Dalam Angka 2020

Perikanan

Daerah NTT merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki potensi sumber daya kelautan cukup banyak dan bervariasi. Namun selama ini potensi tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal. Kondisi ini nampak dari kontribusi sub sektor perikanan terhadap perekonomian masyarakatnya dan juga penyerapan tenaga kerjanya. Pada tahun 2018, jumlah rumah tangga perikanan sebanyak 32.212 rumah tangga atau meningkat 0,20 persen dibanding tahun sebelumnya

Tabel 7.7 Jumlah Rumah Tangga Usaha Perikanan Laut Menurut Kategori Usaha, 2017-2018

Kategori Usaha	2017	2018	Pertumbuhan per tahun (%)
Tanpa Perahu	4 828	4 828	0,00
Perahu Tanpa Motor	13 302	13 302	0,00
Motor Tempel	6 734	6 734	0,00
Kapal Motor	7 283	7 348	0,89
<5 GT	4 458	4 523	2,14
5 GT ke atas	2 825	2 825	0,0
Jumlah	32 147	32 212	0,20

Sumber : Publikasi Statistik Pertanian, 2019

Usaha perikanan mencakup kegiatan penangkapan ikan dan budi daya perikanan. Kedua kegiatan tersebut umumnya dilakukan secara simultan oleh nelayan/rumah tangga. Melihat kondisi ini dapat disimpulkan bahwa kegiatan perikanan belum banyak diminati oleh masyarakat. Sementara itu permintaan terhadap hasil perikanan diperkirakan terus meningkat sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk serta meningkatnya volume ekspor hasil perikanan.

Tabel 7.8 Produksi Perikanan Laut di NTT (ton), 2017-2018

Pulau/Daratan	2017	2018	Pertumbuhan per tahun (%)
Sumba	4 412	2 917	(33,88)
Timor	32 329	36 956	14,31
Alor	9 298	2 469	(73,45)
Flores	92 229	29 883	(67,60)
Jumlah	138 268	72 225	(40,15)

Sumber : Publikasi Statistik Pertanian, 2019

Jumlah armada perikanan di NTT selama 3 tahun terakhir rata-rata mengalami kenaikan. Di tahun 2016-2018 jumlah armada perahu tanpa motor mengalami kenaikan sebesar 22,43 persen dan penambahan armada kapal motor lebih dari 5 GT sebanyak 8,67 persen.

Sementara itu dari kegiatan budidaya perikanan tercatat pada tahun 2018 ada sebanyak 37 ribu rumah tangga yang mengusahakan budidaya perikanan. Perkiraan total produksi pada tahun yang sama mencapai 1,9 juta ton.

Usaha perikanan laut di NTT masih lebih banyak dilakukan dengan menggunakan perahu tanpa motor yaitu sebanyak 13.302 rumah tangga, dimana jumlah pada tahun sebelumnya sama. Kenaikan jumlah rumah tangga usaha perikanan laut pada tahun 2018, tidak mempengaruhi jumlah produksi perikanan laut di NTT, jumlah produksi di tahun 2018 justru malah menurun sekitar 40 persen dari tahun 2017. Alat penangkap ikan terbanyak yang digunakan nelayan NTT pada tahun 2018 adalah Jaring Insang yaitu sebanyak 13.427 buah dan yang paling sedikit digunakan adalah Bagan perahu/rakit tancap/kelong sebanyak 135 buah.

Kehutanan

Hutan adalah salah satu sumber daya alam yang mempunyai peranan penting dalam ekosistem dan peningkatan pendapatan masyarakat di sekitar maupun di luar kawasan hutan tersebut. Hutan mempunyai fungsi ganda yaitu sebagai pengatur dan penyeimbang kelestarian lingkungan hidup, serta merupakan sumber devisa negara. Pemerintah selalu berusaha untuk menjaga kelestarian lingkungan hutan serta memperbaiki kerusakannya, melalui konservasi, rehabilitasi, reboisasi dan investasi hutan.

Kontribusi sub sektor kehutanan di NTT relatif kecil terhadap PDRB NTT yaitu sebesar 0,14 persen. Hasil hutan lain dari jenis kayu-kayuan, arang dan pohon untuk tahun 2018 didominasi oleh kayu jati (8.471 m³) dan kayu rimba campuran (6.854 m³).

Hasil hutan lain berupa non kayu, kulit dan daun didominasi kemiri dan asam. Secara umum pada tahun 2018, produksi kehutanan mengalami penurunan hampir di seluruh komoditi, hal ini perlu mendapat perhatian dari pemerintah, mengingat luas hutan di NTT yang mencapai 1.784.751 Ha.

7.2 Sektor Pertambangan dan Penggalian

Sektor pertambangan dan penggalian termasuk salah satu sektor ekonomi yang belum terlalu berkembang di Nusa Tenggara Timur. Kegiatan ekonomi pada sektor pertambangan dan penggalian sampai saat ini baru meliputi usaha penggalian dan penggaraman tradisional (melalui penyinaran matahari). Produk penggalian pada umumnya berupa bahan baku bagi sektor industri dan konstruksi, seperti tanah liat, batu kapur dan sejenisnya. Penyerapan bahan galian oleh sektor konstruksi relatif dominan, sehingga produksi pada subsektor penggalian sangat dipengaruhi oleh perkembangan yang terjadi pada sektor konstruksi. Peranan sektor pertambangan dan penggalian terhadap perekonomian Nusa Tenggara Timur sampai saat ini masih sangat kecil.

Dalam kurun 2015-2019 sektor ini hanya mampu menyumbang sekitar 1,17 sampai 1,41 persen terhadap PDRB Nusa Tenggara Timur. Sejalan dengan hal tersebut, pertumbuhan sektor ini tidak menggembirakan karena pada tahun 2018 sektor pertambangan dan penggalian mengalami pertumbuhan 1,94 persen setelah pada tahun 2016 pertumbuhan sektor ini mencapai 5,38 persen. Dari Tabel 7.9 dapat dilihat bahwa Nilai Tambah Bruto yang dihasilkan oleh kegiatan Pertambangan Penggalian dan Penggaraman selama tahun 2019 mencapai 1.249 milyar rupiah.

Tabel 7.9 Peranan dan Pertumbuhan Sektor Pertambangan dan Penggalian di NTT, 2015-2019

Tahun	NTB Berlaku (Miliar Rp.)	Peranan	NTB Konstan (Miliar Rp.)	Pertumbuhan (%)
2015	1 073,5	1,41	833,0	4,83
2016	1 164,2	1,39	877,8	5,38
2017	1 177,5	1,30	891,3	1,53
2018*	1 201,7	1,21	908,5	1,94
2019**)	1 249,5	1,17	938,7	3,32

Keterangan : Tahun Dasar 2010

7.3 Sektor Industri Pengolahan

Tabel 7.10 Peranan dan Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan di NTT, 2015-2019

Tahun	NTB Berlaku (Miliar Rp.)	Peranan	NTB Konstan (Miliar Rp.)	Pertumbuhan (%)
2015	940,9	1,24	709,9	5,23
2016	1 043,3	1,23	745,2	4,98
2017	1 147,0	1,26	799,9	7,34
2018*	1 252,7	1,26	841,2	5,16
2019**)	1 405,5	1.31	918,1	9,14

Keterangan : Tahun Dasar 2010

*) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara

Sampai dengan tahun 2019 peranan sektor industri pengolahan terhadap pembentukan PDRB Nusa Tenggara Timur masih relatif kecil. Pada tahun 2016 sektor industri pengolahan pertumbuhannya sekitar 4,98 persen terhadap PDRB Nusa Tenggara Timur, dan pada tahun 2019 pertumbuhannya meningkat menjadi sebesar 9,14 persen. Melihat peranan sektor industri pengolahan yang naik, maka ada harapan bahwa sektor ini bisa menjadi motor penggerak perekonomian provinsi NTT sampai dengan beberapa tahun ke depan. Sebagian besar kegiatan industri pengolahan yang ada di Nusa Tenggara Timur saat ini masih berupa industri kecil dan kerajinan rumah tangga, sementara perusahaan industri besar dan sedang jumlahnya masih sangat sedikit.

7.4 Sektor Pengadaan Listrik dan Gas

Secara umum peranan sektor listrik dan gas terhadap perekonomian Nusa Tenggara Timur masih sangat kecil. Dalam kurun 2015-2019 peranan sektor listrik dan gas hanya berkisar antara 0,06 sampai dengan 0,08 persen dari seluruh PDRB Nusa Tenggara Timur. Walaupun demikian, rata-rata laju pertumbuhan per tahun sektor ini relatif tinggi dalam kurun 2015-2019. Laju pertumbuhan ekonomi sektor listrik dan gas pada tahun 2018 adalah sebesar 9,57 persen, dan mengalami penurunan menjadi 0,82 persen pada tahun 2019. Secara nominal, besarnya NTB sektor ini mencapai 75,5 milyar rupiah pada tahun 2019.

Tabel 7.11 Peranan dan Pertumbuhan Sektor Listrik dan Gas di NTT, 2015-2019

Tahun	NTB Berlaku (Miliar Rp.)	Peranan	NTB Konstan (Miliar Rp.)	Pertumbuhan (%)
2015	43,6	0,06	40,9	14,37
2016	59,3	0,07	46,9	14,61
2017	66,4	0,07	47,2	0,70
2018*	75,1	0,08	51,7	9,57
2019**)	75,5	0,07	52,2	0,82

Keterangan : Tahun Dasar 2010

*) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara

7.5 Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi pengumpulan dan pendistribusian air melalui berbagai saluran pipa untuk kebutuhan rumah tangga dan industri. Termasuk juga kegiatan pengumpulan, penjernihan dan pengolahan air dan sungai, danau, mata air, hujan dll. Tidak termasuk pengoperasian peralatan irigasi untuk keperluan pertanian. Peranan kategori ini terhadap perekonomian di NTT selama tahun 2015-2019 sebesar 0,06-0,08 persen. Sedangkan laju pertumbuhannya yaitu sebesar 2,07 persen; 0,38 persen; 1,43 persen; 5,47 persen; dan 5,44 persen berturut-turut untuk tahun 2015-2019.

7.6 Sektor Konstruksi

Bila dilihat pertumbuhannya, sektor konstruksi ini masih bersifat fluktuatif. Pada tahun 2015 pertumbuhan sektor konstruksi sebesar 4,39 persen kemudian fluktuatif di dua tahun berikutnya. Pada tahun 2018 pertumbuhan sektor ini mencapai 6,39 persen, kemudian pertumbuhan sektor ini kembali menurun di tahun 2019 menjadi 4,43 persen.

Tabel 7.12 Peranan dan Pertumbuhan Sektor Konstruksi di NTT, 2015-2019

Tahun	NTB Berlaku (Miliar Rp.)	Peranan	NTB Konstan (Miliar Rp.)	Pertumbuhan (%)
2015	7 845,1	10,31	5 985,1	4,39
2016	8 957,2	10,70	6 443,6	7,66
2017	9 719,3	10,71	6 819,2	5,83
2018*	10 744,9	10,84	7 254,9	6,39
2019**)	11 606,4	10,86	7 576,2	4,43

Keterangan : Tahun Dasar 2010

*) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara

BAB 8.

PERKEMBANGAN SEKTOR TERSIER



Tahun 2019

Nilai Ekspor NTT
16,28 Juta US\$

Nilai Impor NTT
68,57 Juta US\$

Neraca Perdagangan
NTT di Tahun 2019
Defisit
52,29 Juta US\$

Bab 8. Perkembangan Sektor Tersier



Sumber Gambar : aktual.com; hukumonline.com

Sektor tersier memiliki ciri yang agak berbeda dengan sektor produksi yang telah dibahas pada bab terdahulu. Output dari kegiatan pada sektor ini bukan berupa barang, melainkan jasa pelayanan yang diberikan dan dinikmati oleh pihak lain.

Sektor tersier yang akan diulas pada bab ini mencakup sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; sektor transportasi dan pergudangan; sektor penyediaan akomodasi dan makan minum; sektor informasi dan komunikasi; sektor jasa keuangan dan asuransi; sektor real estate; sektor jasa perusahaan; sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; sektor jasa pendidikan; sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial; dan sektor jasa lainnya.

8.1 Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Selama 5 tahun terakhir, Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menyumbang di atas 10 persen. Pada tahun 2019, kontribusi kategori ini sebesar 11,52 persen terhadap total PDRB. Lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor mendominasi sebagian besar kontribusi tersebut. Sekitar 74 persen kontribusi dari lapangan usaha tersebut, sedangkan sisanya berasal dari lapangan usaha Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya.

Aspek lain yang menarik untuk diamati dari kegiatan perdagangan adalah neraca perdagangannya. Dalam kurun 2015-2019, neraca perdagangan NTT cenderung fluktuatif. Terjadi selisih perdagangan ekspor impor positif (surplus) dan negatif (defisit). Surplus terbesar terjadi di tahun 2015, selisih antara ekspor dan impor mencapai 16,07 juta US \$. Sedangkan defisit terbesar terjadi di tahun 2018 dimana selisih antara ekspor dan impor mencapai 139,29 juta US \$.

Tabel 8.1 Neraca Perdagangan NTT, 2015-2019

Tahun	Ekspor (Juta US\$)	Impor (Juta US\$)	Selisish (Juta US\$)
2015	23,94	7,87	16,07
2016	33,15	29,09	4,06
2017	22,68	73,70	-51,02
2018	17,80	157,09	-139,29
2019	16,28	68,57	-52,29

Sumber : NTT Dalam Angka, 2020

8.2 Sektor Transportasi dan Pergudangan

Transportasi dan Pergudangan terdiri dari 6 subkategori, yaitu subkategori Angkutan Rel, subkategori Angkutan Darat, subkategori Angkutan Laut, subkategori Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan, subkategori Angkutan Udara, serta subkategori Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan. Subkategori Angkutan Darat memberikan kontribusi terbesar selama 5 tahun terakhir, dengan nilai kontribusi terhadap kategori ini sebesar 55,10 persen pada tahun 2019, penyumbang terbesar berikutnya adalah subkategori Angkutan Udara sebesar 26,12 persen dan subkategori Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan sebesar 8,38 persen pada tahun 2019. Sedangkan untuk sub kategori yang memiliki nilai peranan paling kecil adalah sub kategori Angkutan Laut (4,40 persen).

Tabel 8.2 Peranan Lapangan Usaha Terhadap PDRB Kategori Transportasi dan Pergudangan (persen), 2015-2019

Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018*	2019**
Angkutan Rel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Angkutan Darat	63,48	60,61	59,13	56,85	55,10
Angkutan Laut	5,06	4,90	4,73	4,55	4,40
Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	6,05	5,96	6,00	5,74	6,00
Angkutan Udara	16,99	20,46	22,12	24,57	26,12
Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan	8,41	8,08	8,02	8,29	8,38
Transportasi dan Pergudangan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Data PDRB Provinsi NTT Menurut Lapangan Usaha, 2015-2019

Keterangan : Tahun Dasar 2010

*) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara

Angkutan Darat

Salah satu indikator dari kegiatan angkutan darat adalah panjang jalan dan jumlah armada angkutan darat yang beroperasi.

Panjang Jalan

Tabel 8.3 Panjang Jalan Provinsi di NTT Menurut Kabupaten/Kota (kilometer), 2019

Kabupaten/Kota	Panjang Jalan Provinsi
Sumba Barat	87,70
Sumba Timur	274,35
Kupang	469,38
Timor Tengah Selatan	303,99
Timor Tengah Utara	133,61
Belu	63,42
Alor	159,58
Lembata	78,00
Flores Timur	150,99
Sikka	90,69
Ende	146,27
Ngada	207,34
Manggarai	98,10
Rote Ndao	28,01
Manggarai Barat	153,65
Sumba Tengah	26,45
Sumba Barat Daya	83,27
Nagekeo	75,36
Manggarai Timur	164,20
Sabu Raijua	46,60
Malaka	68,16
Kota Kupang	28,07
Jumlah	2 937,19

Sumber : NTT Dalam Angka, 2020

Jalan merupakan prasarana vital bagi kegiatan angkutan darat. Panjang jalan provinsi di Nusa Tenggara Timur pada tahun 2019 mencapai 2.937,19 km.

Tabel 8.4 Panjang Jalan Provinsi Menurut Jenis Permukaan Jalan dan Kabupaten/Kota di NTT, 2019

Kabupaten/Kota	Jenis Permukaan Jalan/			
	Aspal	Tidak Diaspal	Lainnya	Jumlah
Sumba Barat	87,47	-	-	87,70
Sumba Timur	274,35	-	-	274,35
Kupang	347,51	121,87	-	469,38
Timor Tengah Selatan	294,76	9,23	-	303,99
Timor Tengah Utara	133,01	0,60	-	133,61
Belu	63,42	0,00	-	63,42
Alor	123,83	35,75	-	159,58
Lembata	39,00	39,00	-	78,00
Flores Timur	149,89	1,10	-	150,99
Sikka	90,34	0,35	-	90,69
Ende	146,16	0,11	-	146,27
Ngada	199,24	8,10	-	207,34
Manggarai	98,10	0,00	-	98,10
Rote Ndao	28,01	0,00	-	28,01
Manggarai Barat	141,80	11,85	-	153,65
Sumba Tengah	26,45	0,00	-	26,45
Sumba Barat Daya	83,07	0,20	-	83,27
Nagekeo	75,36	0,00	-	75,36
Manggarai Timur	113,00	51,20	-	164,20
Sabu Raijua	39,00	7,60	-	46,60
Malaka	67,93	0,23	-	68,16
Kota Kupang	28,07	0,00	-	28,07
Jumlah	2 650,00	287,19	-	2 937,19

Sumber : NTT Dalam Angka, 2020

Angkutan Laut

Pelabuhan

Kondisi geografis di Nusa Tenggara Timur yang merupakan propinsi kepulauan menuntut tersedianya jaringan perhubungan dan angkutan laut yang tangguh dan luas untuk menghubungkan daerah-daerah kantong produksi dengan daerah konsumen. Jaringan angkutan laut ini juga sangat diperlukan untuk membuka isolasi fisik yang secara langsung berpengaruh dalam pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan.

Tabel 8.5 Arus Kunjungan Kapal Laut pada Setiap Pelabuhan Laut, 2019

Kabupaten/Kota	Pelabuhan laut	Jumlah Kunjungan
Sumba Barat	-	-
Sumba Timur	Waingapu	736
Kupang	Bolak Kupang	1 327
Timor Tengah Selatan	-	-
Timor Tengah Utara	Wini	199
Belu	Atapupu	358
Alor	Kalabahi	2 440
Lembata	Lewoleba	3 006
Flores Timur	Larantuka	8 371
	Mananga	7 269
	Walwerang-Terong	2 255
Sikka	Maumere (Lorensay)	586
	Wuring	610
Ende	Ende Ippi	756
Ngada	Aimere	141
Manggarai	Kendidi Reo	924
Rote Ndao	Baa/Rote	609
	Pante Baru	430
Manggarai Barat	Komodo-Rinca	10
	Labuan Bajo	1 513
Sumba Tengah	Waikelo	-
Sumba Barat Daya	Marapokot	671
Nagekeo	Maumbawa	289
Manggarai Timur	Mborong	2
Sabu Raijua	Sabu Seba-Raijua	26
Malaka	-	-
Kota Kupang	Tenau Kupang	1 883
Jumlah		35 388

Sumber : NTT Dalam Angka, 2020

Dari 22 kabupaten/kota di Nusa Tenggara Timur, ada 19 kabupaten/kota yang memiliki pelabuhan laut. Walaupun demikian tidak semua pelabuhan laut yang terdapat di Nusa Tenggara Timur memiliki aktivitas tinggi. Beberapa pelabuhan juga belum mengadministrasikan kegiatannya secara baik sehingga tidak ada laporan. Pada tahun 2019 terlihat bahwa arus kunjungan kapal tertinggi terjadi di Pelabuhan Larantuka sebanyak 8.371 kunjungan dan Pelabuhan Mananga Flores Timur 7.269 kunjungan.

Lalu Lintas Laut

Tabel 8.6 Arus Penumpang Kapal Laut pada Setiap Pelabuhan Laut, 2019

Kabupaten/Kota	Pelabuhan laut	Naik	Turun
Sumba Barat	-	-	-
Sumba Timur	Waingapu	37 357	33 633
Kupang	Bolak Kupang	196 841	150 472
Timor Tengah Selatan	-	248	102
Timor Tengah Utara	Wini	1 086	801
Belu	Atapupu	86 279	68 791
Alor	Kalabahi	79 132	83 149
Lembata	Lewoleba	166 290	194 298
Flores Timur	Larantuka	35 684	38 534
	Mananga	33 285	23 855
	Walwerang-Terong	62 318	74 524
Sikka	Maumere (Lorensay)	-	-
	Wuring	39 862	41 005
Ende	Ende Ippi	13 743	18 797
Ngada	Aimere	6 672	11 585
Manggarai	Kendidi Reo	62 253	46 869
Rote Ndao	Baa/Rote	58 943	80 592
	Pante Baru	-	-
Manggarai Barat	Komodo-Rinca	18 022	15 764
	Labuan Bajo	12 944	10 524
Sumba Tengah	Waikelo	1 971	2 666
Sumba Barat Daya	Marapokot	-	-
Nagekeo	Maumbawa	-	-
Manggarai Timur	Mborong	37 506	45 289
Sabu Raijua	Sabu Seba-Raijua	-	-
Malaka	-	-	-
Kota Kupang	Tenau Kupang	192 666	163 498
Jumlah		1 143 102	1 104 748

Sumber : NTT Dalam Angka, 2020

Tabel 8.7 Volume Bongkar Muat Barang dan Peti Kemas Pada Setiap Pelabuhan Laut, 2019

Kabupaten/Kota	Pelabuhan laut	Barang		Peti Kemas	
		Bongkar	Muat	Bongkar	Muat
Sumba Barat	-	-	-	-	-
Sumba Timur	Waingapu	210 212	8 211	8 498	1 306
Kupang	Bolok Kupang	34 237	88 828	-	-
Timor Tengah Selatan	-	-	-	-	-
Timor Tengah Utara	Wini	109 113	23 416	-	-
Belu	Atapupu	174 062	111 809	-	-
Alor	Kalabahi	48 816 018	6 154 123	-	-
Lembata	Lewoleba	77 158	169 293	1 220	657
Flores Timur	Larantuka	84 398	32 678	1 145	262
	Mananga	8 151	1 694	-	-
	Walwerang-Terong	24 653	5 657	132	125
Sikka	Maumere (Lorensay)	54 259	2 346	10 231	2 689
	Wuring	35 077	6 993	-	-
Ende	Ende Ippi	377 256	158 903	-	-
Ngada	Aimere	6 332	3 451	-	-
Manggarai	Kendidi Reo	261 970	27 930	5 879	6 143
Rote Ndao	Baa/Rote	1 414 012	20 879	-	-
	Pante Baru	82 478	23 607	-	-
Manggarai Barat	Komodo-Rinca	-	-	-	-
	Labuan Bajo	8 787	-	8 524	60
Sumba Tengah	Waikelo	92 410	20 430	-	-
Sumba Barat Daya	Marapokot	35 117	1 049	-	-
Nagekeo	Maumbawa	2 200	-	-	-
Manggarai Timur	Mborong	-	-	-	-
Sabu Raijua	Sabu Seba-Raijua	411 520	506 911	-	-
Malaka	-	-	-	-	-
Kota Kupang	Tenau Kupang	142 470	31 352	45 728	7 491
Jumlah		52 461 891	7 399 560	81 357	18 733

Sumber : NTT Dalam Angka, 2020

Dari Tabel 8.7 dapat dilihat banyaknya volume bongkar muat barang dan peti kemas pada setiap pelabuhan penyeberangan di NTT. Arus bongkar muat peti kemas yang paling banyak di pelabuhan Tenau Kupang, Maumere Sikka, dan Labuan Bajo Manggarai Barat. Sementara arus bongkar muat barang paling banyak di pelabuhan Kalabahi Kabupaten Alor.

Angkatan Udara

Pelabuhan Udara

Sesuai dengan kondisi geografis Nusa Tenggara Timur angkutan udara dapat menjadi sarana alternatif untuk menghubungkan antar pulau yang ada di wilayah ini. Pada tahun 2019 terdapat 14 pelabuhan udara yang tersebar di wilayah Nusa Tenggara Timur dan dapat disinggahi oleh pesawat jenis Twin Otter atau Casa secara reguler. Ada 5 pelabuhan udara yakni Kupang, Waingapu, Alor, Maumere, dan Labuan Bajo yang sudah dapat disinggahi pesawat jenis Fokker 27. Bahkan pelabuhan udara di Kupang, Maumere dan Sumba Barat Daya saat ini telah dapat disinggahi pesawat jenis Fokker 28 dan DC9.

Kontribusi sub sektor angkutan udara terhadap PDRB Nusa Tenggara Timur sampai saat ini masih relatif kecil. Pada tahun 2019 sumbangan sub sektor ini terhadap PDRB hanya sebesar 1,43 persen.

Lalu Lintas Pesawat dan Penumpang

Pada Tabel 8.8 dapat dilihat perkembangan arus pesawat dan penumpang di Nusa Tenggara Timur sejak tahun 2015 sampai tahun 2019. Pada tahun 2015 frekuensi keberangkatan dan kedatangan pesawat di pelabuhan-pelabuhan udara di wilayah Nusa Tenggara Timur sudah cukup baik dan terus meningkat dari tahun ke tahun. Jika pada tahun 2015 frekuensi kedatangan pesawat hanya 24.732 kali maka pada tahun 2019 sudah menjadi 32.370 kali. Sedangkan jumlah penumpang berangkat meningkat dari 1.723.415 orang pada tahun 2017, setahun kemudian pada tahun 2018 menjadi 2.008.421 orang.

Tabel 8.8 Perkembangan Arus Pesawat dan Penumpang di NTT, 2015-2019

Tahun	Pesawat		Penumpang	
	Datang	Berangkat	Datang	Berangkat
2015	24 732	24 697	1 274 787	1 286 504
2016	28 900	28 877	1 687 407	1 653 065
2017	30 722	30 713	1 723 415	1 684 031
2018	35 182	35 118	2 008 421	1 982 360
2019	32 370	32 389	1 875 615	1 775 971

Sumber : NTT Dalam Angka, 2020

Tabel 8.9 Lalu Lintas Pesawat dan Penumpang Lewat Pelabuhan Udara di NTT, 2019

Kabupaten/Kota	Pelabuhan Udara	Pesawat		Penumpang	
		Datang	Berangkat	Datang	Berangkat
Sumba Timur	Umbu Mehang Kunda	1 425	1 425	72 718	77 495
Belu	Hallwen	1 005	1 005	42 869	45 040
Alor	Mali	1 046	1 046	44 433	49 499
Lembata	Wunopito	380	380	14 011	13 090
Flores Timur	Gewayantana	772	772	37 419	38 146
Sikka	Frans Seda	2 402	2 402	101 962	100 905
Ende	H.H. Areobusman	2 418	2 418	86 939	86 404
Ngada	Turelelo	1 281	1 281	41 083	45 901
Manggarai	Frans Sales Lega	372	372	12 925	13 244
Rote ndao	Lekunik	531	532	28 100	29 780
Manggarai Barat	Komodo	5 436	5 436	347 510	346 505
Sumba Barat Daya	Tambolaka	1 740	1 757	103 642	106 244
Sabu Raijua	Terdamu	586	586	5 780	5 960
Kota Kupang	El Tari	12 976	12 977	936 224	817 758
Jumlah		32 370	32 389	1 875 615	1 775 971

Sumber : NTT Dalam Angka, 2020

Pelabuhan udara El Tari-Kupang, Komodo-Manggarai Barat, Frans Seda-Sikka, H. H. Arubusman-Ende, dan Tambolaka-Sumba Barat tampaknya merupakan pelabuhan udara utama di Nusa Tenggara Timur. Hal ini ditunjukkan oleh tingginya frekuensi pesawat udara yang datang dan berangkat melalui pelabuhan-pelabuhan udara tersebut.

Pola distribusi penumpang dengan menggunakan pesawat udara di Nusa Tenggara Timur hampir serupa dengan pola distribusi arus kedatangan dan keberangkatan pesawat di masing-masing pelabuhan udara. Urutan pelabuhan udara berdasarkan banyaknya penumpang pesawat dilayani pada tahun 2019 adalah El Tari, Komodo, Tambolaka, Frans Seda, dan H.H. Areobusman. Sementara pelabuhan udara yang paling sepi adalah pelabuhan udara Terdamu di Pulau Sabu, yaitu hanya melayani sebanyak 5.960 penumpang yang diberangkatkan.

Bongkar Muat Barang Lewat Udara

Berat barang yang dimuat di pelabuhan-pelabuhan udara di Nusa Tenggara Timur tampaknya lebih stabil perkembangannya. Pada tahun 2016 barang yang dimuat seberat 15.409.821 ton kemudian turun menjadi 3.104.039 ton pada tahun 2017. Di sisi lain, barang yang dibongkar juga turun dari 20.919.549 ton pada tahun 2016 menjadi 5.596.533 ton pada tahun 2017.

Tabel 8.10 Banyaknya Bongkar Muat Barang Angkutan Udara (ton), 2014-2018

Tahun	Bongkar	Muat	Selisih
2014	4 767 242	2 758 706	2 008 536
2015	13 259 420	10 037 468	3 221 952
2016	20 919 549	15 409 821	5 509 728
2017	5 596 533	3 104 039	2 492 494
2018	6 147 753	3 792 467	2 355 286

Sumber : NTT Dalam Angka, 2019

Bongkar muat barang melalui pelabuhan udara di Nusa Tenggara Timur tampaknya didominasi oleh pelabuhan udara El Tari 64,28 persen barang yang dibongkar dan 80,55 persen barang yang dimuat dilakukan di El Tari.

Tabel 8.11 Volume Bongkar Muat Barang Menurut Pelabuhan Udara di NTT (ton), 2018

Pelabuhan Udara	Kabupaten	Bongkar	Muat
Tambolaka	Sumba Barat Daya	377 159	118 748
Umbu Menhang Kunda	Sumba Timur	437 595	58 449
Terdamu	Sabu Raijua	6 281	1 476
Haliwen	Belu	-	-
Mali	Alor	85 520	17 643
Wunipoto	Lembata	44 409	15 974
Gewayantana	Flores Timur	64 623	23 003
Frans Seda	Sikka	283 163	227 003
H.H. Aroebusman	Ende	137 050	35 939
Tureleleo	Ngada	50 002	7 158
Frans Sales Lega	Manggarai	71 746	17 867
Lekunik	Rote Ndao	20 243	19 854
Komodo	Manggarai Barat	617 787	194 196
El Tari	Kota Kupang	3 952 175	3 054 917
Jumlah		6 147 753	3 792 467

Sumber : NTT Dalam Angka, 2019

8.3 Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Pada tahun 2019, kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum berkontribusi terhadap PDRB Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 0,75 persen, di mana sebesar 41,21 persen terhadap kategori merupakan kontribusi dari lapangan usaha Penyediaan Makan Minum dan sisanya disumbangkan oleh lapangan usaha Penyediaan Akomodasi.

Secara keseluruhan, kategori ini mencatatkan laju pertumbuhan positif sebesar 5,99 persen pada tahun 2019, sedikit mengalami perlambatan dibandingkan pada tahun 2018 yang sebesar 12,16 persen. Masing-masing lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Sub Kategori Penyediaan Makan Minum juga menunjukkan pertumbuhan positif pada tahun 2019 sebesar masing-masing 10,37 persen dan 0,02 persen. Secara keseluruhan, persentase tingkat penghunian kamar hotel di NTT tahun 2019 sebesar 50,77 persen untuk hotel berbintang,.

Tabel 8.12 Persentase Tingkat Penghunian Kamar Hotel Berbintang di NTT, 2019

Bulan	Hotel Berbintang
Januari	35,39
Februari	45,40
Maret	44,88
April	54,73
Mei	49,52
Juni	51,40
Juli	53,12
Agustus	58,72
September	52,26
Oktober	55,59
Nopember	52,55
Desember	53,75
Tahunan	50,77

Sumber : NTT Dalam Angka, 2020

8.4 Sektor Informasi dan Komunikasi

Jaringan komunikasi yang baik merupakan salah satu unsur penting yang menunjang kegiatan pembangunan di Nusa Tenggara Timur terutama karena kondisi geografisnya. Dalam perekonomian Nusa Tenggara Timur peranan sub sektor komunikasi masih sangat kecil.

Kategori informasi dan komunikasi memiliki peranan sebagai penunjang aktivitas di setiap bidang ekonomi. Dalam era globalisasi, peranan kategori ini sangat vital dan menjadi indikator kemajuan suatu bangsa, terutama jasa telekomunikasi. Peranan kategori ini terhadap perekonomian di Provinsi Nusa Tenggara Timur selama tahun 2015-2019 sebesar 7,20 persen, 7,02 persen, 6,83 persen, 6,63 persen, dan 6,62 persen. Sedangkan laju pertumbuhan per tahun berkisar 4-7 persen dalam kurun waktu 2015-2019.

Penggunaan sarana telepon dalam kehidupan modern sudah merupakan suatu kebutuhan dalam berkomunikasi. Telepon merupakan sarana teknologi informasi dan komunikasi. Jumlah pengguna telepon di NTT sudah cukup banyak. Jika dibandingkan antar kabupaten/kota, pelanggan telepon perorangan paling besar berada di Kota Kupang, yaitu hampir setengah pelanggan telepon perorangan di NTT. Seluruh Kabupaten Kota di Provinsi NTT telah terakses saluran telpon. Perbandingan jumlah pelanggan telpon antar kabupaten di mana berbeda jauh dengan pelanggan di Kota Kupang, menggambarkan ketimpangan yang besar antar kabupaten.

Dari Tabel 8.13 dapat dilihat bahwa jumlah pelanggan telepon pada tahun 2019 mencapai 41.108 pelanggan. Jumlah ini menurun dari tahun sebelumnya yang mencapai 52.582 pelanggan. Penurunan pelanggan banyak terjadi pada pelanggan perorangan yang jumlahnya pada tahun 2018 sejumlah 46.776 pelanggan menjadi 32.389 pelanggan di tahun 2019. Hal ini bisa jadi dipengaruhi pergeseran pelanggan beralih menggunakan telepon genggam sebagai sarana komunikasi.

Tabel 8.13 Jumlah Pelanggan Telepon Kelompok Perusahaan dan Perorangan di Setiap Kabupaten/Kota, 2019

Kabupaten/Kota	Pelanggan		Jumlah
	Perusahaan	Perorangan	
Sumba Barat	154	561	715
Sumba Timur	425	1 718	2 143
Kupang	94	210	304
Timor Tengah Selatan	196	770	966
Timor Tengah Utara	172	1 033	1 205
Belu	54	1 992	2 046
Alor	163	677	840
Lembata	62	405	467
Flores Timur	256	1 213	1 469
Sikka	375	2 575	2 950
Ende	251	1 921	2 172
Ngada	139	689	828
Manggarai	168	1 084	1 252
Rote Ndao	53	300	353
Manggarai Barat	534	1 437	1 971
Sumba Tengah	12	111	123
Sumba Barat Daya	40	233	273
Nagekeo	33	274	307
Manggarai Timur	14	121	135
Sabu Raijua	29	158	187
Malaka	73	213	286
Kota Kupang	5 422	14 694	20 116
Jumlah	8 719	32 389	41 108

Sumber : NTT Dalam Angka, 2020

8.5 Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi

Sektor jasa keuangan dan asuransi menyumbang 4,03 persen bagi PDRB NTT. Kegiatan ekonomi pada lapangan usaha jasa perantara keuangan menjadi penyumbang mayoritas kontribusi perekonomian pada kategori jasa keuangan dan asuransi ini. Selama tahun 2015-2019, kontribusinya mendominasi sekitar 60 persen terhadap PDRB kategori jasa keuangan dan asuransi.

Tabel 8.14 Jumlah Kantor Bank Umum di NTT Menurut Kabupaten/Kota, 2019

Kabupaten/Kota	Bank			Jumlah
	BRI	BPD	Lainnya	
Sumba Barat	11	5	-	16
Sumba Timur	13	12	2	27
Kupang	14	12	4	30
Timor Tengah Selatan	24	11	3	38
Timor Tengah Utara	14	7	-	21
Belu	20	14	5	39
Alor	12	9	1	22
Lembata	9	8	-	17
Flores Timur	16	9	-	25
Sikka	15	9	4	28
Ende	19	9	4	32
Ngada	17	5	-	22
Manggarai	18	10	3	31
Rote Ndao	5	7	-	12
Manggarai Barat	6	8	1	15
Sumba Tengah	0	3	-	3
Sumba Barat Daya	1	6	-	7
Nagekeo	4	8	-	12
Manggarai Timur	2	7	-	9
Sabu Raijua	1	3	-	4
Malaka	1	1	-	2
Kota Kupang	32	26	22	80
Jumlah	254	189	49	492

Sumber : NTT Dalam Angka, 2020

Tabel 8.15 Posisi Kredit Perbankan Menurut Jenis Penggunaan di NTT, 2014-2018

Tahun	Investasi	Modal Kerja	Konsumsi	Jumlah
2014	1 368 254	5 402 996	10 641 761	17 413 011
2015	1 708 538	6 300 369	12 641 158	20 650 065
2016	1 717 673	7 351 249	14 220 429	23 289 351
2017	2 362 685	8 525 236	16 105 859	26 993 780
2018	2 729 475	9 651 089	18 262 816	30 643 381

Sumber : NTT Dalam Angka, 2019

Tabel 8.16 Posisi Kredit Perbankan Menurut Kabupaten/Kota di NTT, 2014-2018

Kabupaten/Kota	2014	2015	2016	2017	2018
Sumba Barat	1 003 933	659 386	757 647	786 643	979 832
Sumba Timur	600 765	1 007 521	1 134 254	1 326 556	1 544 798
Kupang	876 143	2 091 001	2 250 022	3 154 853	3 611 237
Timor Tengah Selatan	1 784 852	961 484	1 125 420	1 308 697	1 507 704
Timor Tengah Utara	845 209	906 596	1 030 681	1 179 250	1 368 825
Belu	821 425	1 624 964	1 892 120	1 836 803	2 130 127
Alor	1 383 002	725 864	793 700	913 327	1 077 787
Lembata	311 166	610 771	683 615	745 058	842 272
Flores Timur	618 231	994 786	1 051 371	1 127 980	1 224 468
Sikka	529 508	1 302 415	1 445 198	1 600 497	1 756 915
Ende	956 549	1 122 050	1 284 812	1 465 011	1 652 309
Ngada	1 120 313	667 591	782 497	878 563	1 108 611
Manggarai	1 028 240	1 076 168	1 185 005	1 268 926	1 474 820
Rote Ndao	300 727	379 409	456 989	549 443	616 361
Manggarai Barat	105 933	403 861	510 799	353 905	747 193
Sumba Tengah	250 051	133 892	158 575	182 194	197 886
Sumba Barat Daya	213 836	318 628	369 273	477 162	551 344
Nagekeo	592 959	291 126	352 186	434 917	486 246
Manggarai Timur	204 150	266 106	314 841	615 014	392 028
Sabu Raijua	53 960	82 945	121 845	141 780	158 586
Malaka	-	-	-	361 824	397 119
Lainnya	-	-	4 193	-	-
Kota Kupang	4 415 892	5 023 502	5 584 357	6 285 378	6 816 911
Total	18 016 844	20 650 065	23 289 401	26 993 780	30 643 381

Sumber : NTT Dalam Angka, 2019

8.6 Sektor Real Estate

Kategori real estat memberikan kontribusi yang relatif stabil bagi PDRB Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan peranan sebesar kurang dari 3 persen. Selama tahun 2015-2019, secara berturut-turut sumbangan kategori real estat sebesar 2,70 persen, 2,60 persen, 2,55 persen, 2,50 persen dan 2,32 persen. Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi kategori ini berturut-turut dari tahun 2018 sebesar 4,85 persen menjadi -0,002 persen pada tahun 2019.

8.7 Sektor Jasa Perusahaan

Selama 5 tahun terakhir, kontribusi kegiatan ekonomi pada kategori jasa perusahaan relatif tidak berubah, yaitu dari tahun 2015-2019 nilainya masih kurang dari 1 persen. Hal ini menunjukkan pula peranan kategori ini relatif kecil dibandingkan peranan kategori-kategori lainnya pada perekonomian Nusa Tenggara Timur. Sedangkan laju pertumbuhannya mengalami perlambatan dari 4,61 persen pada tahun 2015 menjadi 3,86 persen pada tahun 2019. Pada tahun 2016-2018 pertumbuhan kategori jasa perusahaan adalah sebesar 2,83 persen, 1,43 persen dan 1,67 persen.

8.8 Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial

Kategori ini meliputi kegiatan yang sifatnya pemerintahan, yang umumnya dilakukan oleh administrasi pemerintahan termasuk juga perundang-undangan dan penterjemahan hukum yang berkaitan dengan pengadilan dan menurut peraturannya. Selama tahun 2015-2019 peranannya relatif stabil dengan menunjukkan sedikit peningkatan, yaitu dengan nilai kontribusi sebesar 12,32 persen, 12,74 persen, 12,89 persen, 13,36 persen dan 13,66 persen. Sedangkan laju pertumbuhannya selalu positif dengan tren terus naik, yaitu dari sebesar 6,81 persen di tahun 2015 menjadi 8,17 persen di tahun 2019.

Kegiatan pemerintahan umum pada dasarnya mencakup semua kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di suatu wilayah. Oleh karena itu kegiatan produksi sub sektor pemerintahan umum sangat tergantung pada kondisi keuangan di daerah atau wilayah yang diamati.

Penerimaan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2015 sebesar 3.315, 66 milyar rupiah meningkat sebesar 47,24 persen menjadi 4.968,98 milyar rupiah pada tahun 2018. Penerimaan daerah ini meliputi 3 komponen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah.

Pendapatan Asli Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2018 sebesar 1.061,82 milyar rupiah, besarnya dana perimbangan pada tahun 2018 sejumlah 3.799,58 milyar rupiah, dan pendapatan lain-lain yang sah adalah sebesar 20,66 milyar rupiah.

Tabel 8.17 Realisasi Pendapatan Daerah Otonom Tingkat I NTT Menurut Jenis Pendapatan, Tahun Anggaran 2018

Perincian	2018 *(ribu rupiah)
1. Pendapatan Daerah	1 061 828 395
1.1 Pajak Daerah	822 886 747
1.2 Retribusi Daerah	24 488 354
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipindahkan	72 250 000
1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	142 203 294
2. Dana Perimbangan	3 799 586 456
2.1 Bagi Hasil Pajak	84 557 194
2.2 Bagi hasil Bukan Pajak	2 277 121
2.3 Dana Alokasi Umum	1 827 412 640
2.4 Dana Alokasi Khusus	1 885 339 501
3. Lain-Lain Pendapatan yang Sah	20 663 129
Jumlah	4 968 984 219

Sumber : NTT Dalam Angka, 2019

*) Data Belum Diaudit

8.9 Sektor Jasa Pendidikan

Pada tahun 2019 jasa pendidikan menyumbang sebesar 9,59 persen terhadap total perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan distribusi yang tidak banyak berubah dibandingkan pada tahun 2015. Tren peningkatan kontribusi kategori ini juga terlihat pada tahun 2016-2018 yaitu sebesar berturut-turut 9,52 persen, 9,66 persen dan 9,55 persen. Dengan penghitungan atas dasar harga konstan 2010, laju pertumbuhan jasa pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami kenaikan dari 4,27 persen pada tahun 2015 menjadi 5,34 persen pada tahun 2019.

8.10 Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Kategori ini mencakup kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang cukup luas cakupannya. Pada tahun 2019, kontribusinya terhadap perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 2,08 persen dengan laju pertumbuhan sebesar 4,27 persen. Selama tahun 2015-2019 perannya relatif stabil dengan menunjukkan sedikit peningkatan, yaitu dengan nilai kontribusi sebesar 2,08 persen, 2,11 persen, 2,14 persen, 2,17 persen dan 2,18 persen.. Sedangkan laju pertumbuhannya selalu di atas 5 persen pada periode 2015-2019.

8.11 Sektor Jasa Lainnya

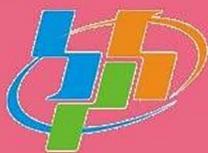
Kontribusi Jasa Lainnya terhadap perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Timur relatif stabil yaitu berturut-turut sejak 2015-2019 sebesar 2,15 persen, 2,12 persen, 2,14 persen, 2,17 persen, dan 2,18 persen. Sedangkan laju pertumbuhannya selalu positif yaitu 3,72 persen, 3,55 persen, 6,99 persen, 6,47 persen dan 6,55 persen.



Sensus
Penduduk
2020

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Jl. R. Suprpto No.5 Kupang 85111
Telp.: (0380) 826289, 821755 - Fax. (0380) 833124
Homepage: ntt.bps.go.id; E-mail: bps5300@bps.go.id

ISSN 2460-6189



9 772460 618002 >